

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS
NAGARI TALUK TIGO SAKATO

LATORAN PENYUSUNAN PEMERINTAHAN NAGARI

TAHUN 2019

PEMERINTAHAN NAGARI TALUK TIGO SAKATO
TAHUN 2019

DAFTAR ISI

i	Kata Pengantar.....	i-ii
ii	Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.....	i-vii
iii	Daftar Isi.....	i-ii
BAB I	PENDAHULUAN.....	I-1
1.1.	Dasar Hukum.....	I-1
1.2.	Gambaran Umum Nagari.....	I-2
1.2.1	Kondisi Geografis.....	I-2
1.2.2	Gambaran Umum Demografis.....	I-2
1.2.1.1	Demografi.....	I-2
1.2.1.2	Topografi.....	I-7
1.2.1.3	Hidrologi.....	I-7
1.2.1.4	Sejarah Pemerintahan Nagari.....	I-7
1.2.1.5	Asal usul/ Legenda Nagari.....	I-8
1.2.3	Kondisi Ekonomi.....	I-9
1.2.3.1	Potensi Ekonomi Unggulan Nagari.....	I-10
1.2.4	Struktur Pemerintahan Nagari.....	I-12
1.2.5	Kelembagaan Nagari.....	I-14
BAB II	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI.....	II-1
2.1.	Visi dan Misi.....	II-1
2.2.	Strategi dan Arah Kebijakan.....	II-1
2.2.1.	Strategi Pembangunan Nagari.....	II-1
2.2.2.	Arah Kebijakan Nagari.....	II-4
2.3.	Prioritas Pembangunan Nagari.....	II-6
2.3.1.	Bidang Keagamaan.....	II-6
2.3.2.	Bidang Pendidikan.....	II-6
2.3.3.	Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Keamanan.....	II-7
2.3.4.	Bidang Kesehatan.....	II-7
2.3.5.	Bidang Ekonomi.....	II-9
2.3.6.	Bidang Pemerintahan.....	II-10
BAB III	KEWENANGAN NAGARI.....	III-1
3.1.	Hak Asal Usul Nagari.....	III-1
3.1.1.	Program dan Kegiatan.....	III-1
3.1.2.	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.....	III-5
3.1.3.	Satuan Pelaksaan kegiatan nagari.....	III-6

3.1.4. Permasalahan dan Penyelesaian	III-6
3.2. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten / Kota	III-7
3.2.1. Program dan kegiatan	III-7
3.2.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	III-7
3.2.3. Permasalahan dan Penyelesaian	III-9
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS DAN PEMBANTUAN.....	IV-1
4.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima.....	IV-1
4.1.1. Dasar Hukum.....	IV-1
4.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.....	IV-1
4.1.3. Satuan Kerja Perangkat Nagari.....	IV-2
4.1.4. Kegiatan Yang Diterima.....	IV-2
4.1.5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan.....	IV-2
4.1.6. Permasalahan dan Penyelesaian.....	IV-3
BAB V PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA.....	V-1
5.1. Kerjasama Antar Nagari.....	V-1
5.1.1 Kebijakan dan Kegiatan.....	V-1
5.1.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.....	V-1
5.1.3 Permasalahan dan Penyelesaian.....	V-1
5.2. Kerjasama dengan Pihak Ke Tiga.....	V-1
5.2.1 Kebijakan dan Kegiatan.....	V-1
5.2.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.....	V-2
5.2.3 Permasalahan dan Penyelesaian.....	V-2
5.3 Batas Nagari.....	V-2
5.3.1 Kebijakan dan Kegiatan.....	V-2
5.3.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.....	V
5.3.3 Permasalahan dan Penyelesaian.....	V-3
5.4. Pencegahan Penanggulangan Bencana.....	V-3
5.4.1 Bencana yang terjadi dan Penanggulannya.....	V-3
5.4.2 Sumber dan jumlah anggaran.....	V-3
5.4.4 Potensi Bencana yang diperkirakan Terjadi.....	V-4
5.5. Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum.....	V-4
5.5.1 Gangguan yang terjadi.....	V-5
5.5.2 Satuan Pelaksanaan Kegiatan Nagari.....	V-5
5.5.3 Data Perangkat Nagari.....	V-5
5.5.4 Sumber dan Jumlah Anggaran.....	V-6
5.5.5 Penanggulangan dan Kendalanya.....	V-6

5.5.6 Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam

Penyelenggaraan.....

V-6

BAB VI PENUTUP

VI-1

LAMPIRAN :

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI
(LPPN)
TAHUN 2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019. Laporan ini disusun secara formal untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 35 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Nagari

Kemudian salawat beriring salam kita mohonkan kehadiran Allah SWT, semoga dilimpahkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi Besar Muhammad SAW.

Laporan ini kami sajikan dengan sistematika, sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi Dasar hukum dan gambaran umum penyelenggaraan pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato.
- Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) Taluk Tigo Sakato
- Bab III Kewenangan Nagari yang berisi urusan hak asal usul Nagari dan urusan daerah yang diserahkan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- Bab IV Penyelenggaraan Tugas dan Pembantuan, berisi pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima dan yang diberikan kepada Nagari.
- Bab V Penyelenggaran Urusan pemerintah lainnya.
- Bab VI Penutup

Disamping itu dengan adanya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang berbagai capaian kinerja, baik makro

maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari tahun 2019. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Nagari Taluk Tigo Sakato dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan tugas pemerintah daerah.

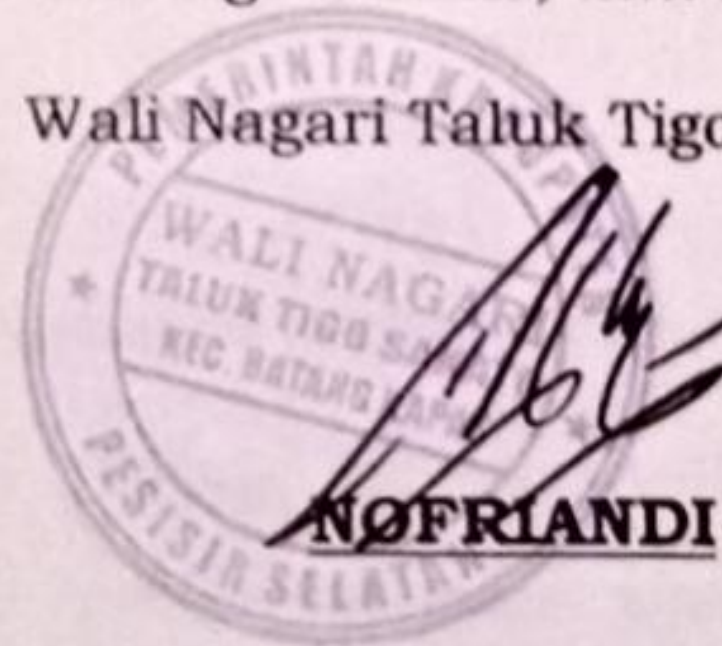
Kami dari Pemerintahan Nagari menyadari dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang kami miliki belum bisa semaksimal mungkin untuk mencapai apa-apa yang diinginkan oleh masyarakat Nagari Taluk Tigo Sakato, tapi walaupun demikian kami pun merasakan bahwa kita telah bekerja dengan baik dan telah menjalankan tugas-tugas sesuai dengan bidang kita masing-masing.

Kemudian pada kesempatan ini, kami akan melaporkan semua kerja sama yang sudah kita jalani sejak tanggal 01 Januari tahun 2019 lalu. Harapan kami semoga semua materi laporan kegiatan ini dapat dimaklumi dan dipahami. Adapun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari ini disampaikan supaya kita dapat mengevaluasi segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Taluk Tigo Sakato Tahun 2019 sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

Selama tahun Anggaran 2019 ini, proses pelaksanaan tugas dan kebijakan telah kita ambil masih menghadapi tantangan, kendala dan hambatan namun Insyaallah masih dapat diatasi dengan musyawarah dan mufakat.

Nagari Taluk Tigo Sakato, Februari 2020.

Wali Nagari Taluk Tigo Sakato ,



NOFRIANDI

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI NAGARI TALUK TIGO SAKATO KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2019

I. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI

A. URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI

Di dalam melaksanakan setiap kegiatan Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato, Wali Nagari mengedepankan kerjasama dengan semua lembaga dan unsur yang ada di Nagari Taluk Tigo Sakato sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan tersebut bisa mencapai hasil yang memuaskan.

Kegiatan yang dilaksanakan tersebut antara lain :

1. Program Dana alokasi Pembangunan Nagari Taluk Tigo Sakato meliputi beberapa kegiatan yaitu :

a. Fisik

- Pembuatan Tiang dan Slop Kantor Wali Nagari
- Pengadaan printer
- Pembuatan Profil Nagari
- Bulan Bakti Gotong royong
- Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

b. Sosial Budaya dan Pendidikan

- Pembangunan Masjid dan Mushalla
- Pembinaan kader kader
- Pelaksanaan Musrenbang.
- Bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan lainnya

2. Bantuan Operasional Nagari digunakan seefektif dan seefisien mungkin sehingga kerja dan profesionalisme perangkat menjadi meningkat

3. Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Nagari Taluk Tigo Sakato dibelanjakan dengan semestinya.

Di samping dukungan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan di nagari Taluk Tigo Sakato, swadaya masyarakat sangat banyak memotivasi program-program yang diturunkan. Swadaya tersebut terbagi dalam beberapa bentuk seperti berupa materi, tenaga dan sumbangan pemikiran.

B. URUSAN PEMERINTAHAN DILAKSANAKAN LANGSUNG OLEH NAGARI

Program Dan Kegiatan

Program yang direncanakan untuk tahun anggaran 2019 berdasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2018 - 2024, sebahagian besar dapat dilaksanakan walaupun masih ada kegiatan yang belum dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan tahun sebelumnya.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pembangunan nagari antara lain :

1. Pengembangan Wisata Batu Kudo
2. Pengembangan Dana Bergulir SPP di Lembaga LKMA dalam rangka menunjang peningkatan permodalan bagi masyarakat Nagari

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi beberapa kegiatan antara lain :

1. Bidang Pemerintahan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Nagari merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Wacana tentang manajemen pelayanan prima, dengan harapan mampu merubah sikap dan perilaku sehingga meningkatkan kesadaran tentang kewajiban perangkat desa / nagari dalam menjamin terlaksananya pelayanan umum yang prima untuk menjangkau masyarakat secara adil dan merata di desa / nagari.

Pelayanan prima mengandung Pengertian system pengelolaan organisasi dalam melayani kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara prima, tepat waktu, mudah, murah, merata, terbuka, efisien,

dan ekonomis dalam kondisi yang adil, aman, nyaman, melalui prosedur yang sederhana jelas dan pasti. Prinsip dasar pengembangan pelayanan prima antara lain :

1. Berorientasi kepuasan pelanggan.
2. Perbaikan yang kesinambungan.
3. Manajemen berdasarkan fakta.
4. Melibatkan dan memberdayakan seluruh unsur organisasi secara menyeluruh.
5. Mengembangkan potensi daya pikir manusia.
6. Budaya organisasi adalah moral tinggi.

Berdasarkan realitas yang telah dilaksanakan, maka perlu adanya perubahan sikap dan perilaku dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Nagari karena masyarakat semakin kritis menilai kinerja perangkat desa/ nagari.

Mendasari ketentuan dari prinsip - prinsip dasar pelayanan, untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa / Nagari telah melaksanakan pelayanan dalam bentuk antara lain :

1. Pembagian tugas masing - masing kaur.
2. Sistem buka kantor tepat waktu.
3. Pelayanan cepat.
4. Sistem saling membantu dan kekompakan kerja antar perangkat

Pelaksanaan pada bidang pemerintahan telah dilaksanakan kegiatan guna menunjang program pemerintah serta memberikan layanan yang maksimal pada masyarakat, adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pembuatan KTP
- b. Pengurusan Pembuatan Perizinan (IMB, SITU dll).
- c. Bidang Administarsi lainnya

2. Bidang Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan kegiatan pada bidang sarana dan prasarana meliputi beberapa kegiatan antara lain :

NO	JENIS PEMBANGUNAN	Alamat/ Kampung	SUMBER
1	Normalisasi Sungai Tanjung Kandis	Tanjung Kandis	Aspirasi DPRD
2	Lanjutan Pembukaan Jalan Usaha Tanui Bukit Lintang	Koto Keduduk	Aspirasi DPRD
3	Pembukaan Jalan Baru Usaha Tani Limau Antu	Koto Keduduk	Aspirasi DPRD
4	Pembangunan Pengeringan Rawa Rawang Kambing	Koto Keduduk	Aspirasi DPRD
5	Bantau Mesin Alsintan Kelompok Tani Sawah Jambak dan Sawah Tengah	Tanjung Kandis	APBD Kabupaten
6	Bantuan Mesin Alsintan Gapoktan	Nagari TTS	APBD Kabupaten
7	Bantuan SANI TASI	Koto Keduduk	DAK APBD Kabupaten
8	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	Nagari TTS	Aspirasi DPRD
9	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	Bapak Wartan	BASNAZ Kabupaten
10	Bantuan Kilo Meter Listrik	Nagari TTS	Aspirasi DPRD
11	Pengembangan Wisata Batu Kudo	Koto Panjang	APBN
12	Pencorandan Pengadaan Pintu Gerbang TK -PAUD TUNAS HARAPAN	Koto Keduduk	APBN
13	Rabat Beto dan Parit Miring Jalan Perkebunan	Koto Panjang	APBN
14	Pembuatan Kolm Ikan	Koto Panjang	APBN
15	Pengadaan Alat Kesehatan dan Mobiler Pos Yandu	Nagari TTS	APBN
16	Bantuan Jambanan Masyarakat Miskin	Nagari TTS	APBN

17	Sambuungan Rabat Beton Jalan Mesjid Taqwa	Koto Panjang	APBN
18	RTLH	Nagari Taluk Tigo Sakato	APBN
19	Pembangunan Gerbang Wisata Batu Kudo	Koto Keduduk	APBN
20	Pemabangunan Lapangan Olah Raga	Nagari TTS	APBN
21	Pengadaan Plank Asmaul Husnah	Nagari TTS	APBN
20	Pemabanguan Saluran Jalan Desa Tanjung Durian	Tanjung Kandis	APBN

Permasalahan Dan Penyelesaian

Dalam pelaksanaan kegiatan, permasalahan-permasalahan yang timbul dalam rangka realisasi dari pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2019 meliputi beberapa hal antara lain :

- Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan usaha pertanian yang timbul adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat dengan program-program pemerintah dalam percepatan pembangunan di daerah-daerah yang mendapatkan bantuan sehingga pencapaian target pelaksanaan kegiatan mengalami hambatan.
- Akan tetapi berkat usaha dari Pemerintahan Nagari memberikan dan menyampaikan maksud dan tujuan dari suatu program pemerintah terhadap pembangunan baik fisik maupun non fisik pada suatu daerah, permasalahan yang timbul tersebut dapat diperkecil.
- Faktor lain yang juga menjadi permasalahan adalah faktor cuaca. Faktor cuaca yang ada pada saat pelaksanaan kegiatan juga menjadi masalah dalam penyelesaian kegiatan, akan tetapi berkat usaha dan arahan kegiatan-kegiatan yang ada dapat diselesaikan dengan baik dan ini tidak terlepas dari kebersamaan dengan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
- Faktor Kesadaran masyarakat dalam bekerjasama (gotong Royong) dengan menurunnya rasa kebersamaan dalam membangun nagari hal ini terlihat pada saat dilaksanakan Gotong Royong yang hadir lebih

banyak dari para petani, sedangkan masyarakat yang bergerak dibidang jasa dan lainnya sangat kecil sekali.

Akan tetapi pemerintah nagari tidak akan bosan untuk mengajak (mengundang) masyarakat yang bergerak dibidang jasa dan lainnya untuk melaksanakan kegiatan gotong royong dalam menunjang pembukaan jalan ke sentra ekonomi masyarakat.

C. TUGAS PEMBANTUAN

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan, instansi pemberi tugas adalah :

- Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Satuan Kerja Perangkat Nagari

Untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan tugas dan pembantu pada pembangunan Nagari Tahun 2019, Nagari telah membentuk tenaga pemungut PBB / Kelektor , sesuai dengan Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor /Kpts / WN-TTS/ 2019 tanggal 2019 tentang penunjukan Tim Pemungut PBB-P2 Nagari Taluk Tigo Sakato tahun 2019, Tenaga Pemungut PBB tersebut terdiri dari :

1. Wali Nagari selaku Penanggung jawab
2. Sekretaris Nagari selaku Sekretaris Penanggung jawab
3. Kasi Pemerintahan selaku Kolektor nagari
4. Kepala Kampung selaku Kolektor

Kegiatan Yang Diterima

Kegiatan Pembantuan yang diterima oleh Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato pada tahun 2019 ini diantaranya adalah Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Kepala Kampung sebagai kolektor, sedangkan di tingkat nagari juga dibentuk Koordinator nagari yang terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan Kasi Pemerintahan.

Sumber Dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan

Sumber dana dan jumlah Anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan tugas dan pembantuan yang diterima selama ini belum mempunyai sumber dana dan anggaran yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan tugas dan pembantuan, namun baru hanya diberikan upah pungut untuk kolektor Rp. 1.000.- untuk satu lembar STTS, sedangkan untuk uang lelah petugas ditingkat nagari belum ada.

Sesuai dengan ketetapan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2015 PBB-P2 Nagari IV Koto Mudiek adalah sebagai berikut :

- Target : Rp 13.561.346, -
- Realisasi : Rp 12.048.941,-
- Yang bermasalah : Rp 1.512.405,-
- STTS seluruhnya : 655 lembar
- STTS yang distorkan : 496 lembar

Dengan demikian target murni PBB Nagari Taluk Tigo Sakato Tahun 2019 adalah Rp 13.561.346 di kurang yang bermasalah Rp 1.512.405, = Rp 12.048.941.

Setelah dilakukan pemungutan terhadap wajib pajak terealisasi sekitar Rp 12.048.941 atau 100 % dari target murni.

Permasalahan Dan Penyelesaian

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan di Nagari Taluk Tigo Sakato ini memang terkendala dengan masih ditemukannya lembaran SPPT yang tidak jelas sehingga masyarakat merasa terbebani dengan SPPT tersebut.

Permasalahan tersebut diatas telah dicoba untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat agar masyarakat berkeinginan untuk membayar kewajibannya, ditambah dengan banyaknya bantuan yang telah diterima Nagari bila dibandingkan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan masyarakat kepada Negara.

Semua permasalahan PBB tersebut telah dikumpulkan dan direkap dan selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Badan Pendapatan melalui kantor camat Batangkapas, dengan harapan ini dapat dicarikan solusinya dalam tahun 2020 ini.

Sumber Dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan

Sumber dana dan jumlah Anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan tugas dan pembantuan yang diterima selama ini belum mempunyai sumber dana dan anggaran yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan tugas dan pembantuan.

Permasalahan Dan Penyelesaian

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan di Nagari Taluk Tigo Sakato ini memang terkendala dengan masih ditemukannya lembaran SPT yang tidak jelas sehingga masyarakat merasa terbebani dengan SPT tersebut.

Permasalahan tersebut diatas telah dicoba untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat agar masyarakat berkeinginan untuk membayar kewajibannya, ditambah dengan banyaknya bantuan yang telah diterima Nagari bila dibandingkan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan masyarakat kepada Negara.

URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

Kebijakan Dan Kegiatan

Adapun kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan pembangunan antara lain Pengembangan Wisata Batu Kudo, Pencoran Halan TK -PAUD dan Pemasangan Pintu Gerbang, lanjutan Rabat Beton Jalan Mesjid Taqwa, Parit Miring dan Rabat Beto Jalan Perkebunan, Pengadaan KolomIkan, PengadaanPeralatan Alat Kesehatan dan Mobiler Pos Yandu, Pemangunan Gapura Wisat Batu Kudo, RTLH, Bantuan Jamban Masyarakat, Pembangunan Saluran Drenase Jalan Desa, Pengadaan Lapangan Olah Raga, Pengadaan Plank Asmaul Husnah. dan kegiatan Pembangunan lainnya, baik bidang fisik maupun non fisik .

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Semua Rencana kegiatan pembangunan untuk tahun 2019 telah selesai dilaksanakan. Disamping itu Kantor Wali Nagari Taluk Tigo Sakato dan Kantor BAMUS Nagari, PKK dan LPMN yang lebih presentatif belum dapat diwujudkan, dan baru hanya dalam tahap persiapan lokasi.

Permasalahan Dan Penyelesaian

Dalam pelaksanaan roda Pemerintahan terkadang kurang memenuhi keinginan kita semua, bahkan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari belum dapat terpenuhi secara keseluruhan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Belum sepenuhnya potensi yang ada di Nagari dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan roda Pemerintahan Nagari.
2. Kurangnya keahlian dan kemampuan tenaga pengelola dalam menggali potensi yang ada.
3. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, yang terlihat dari masih kurangnya Nilai Swadaya dan partisipasi masyarakat

Untuk penyelesaian dari masalah yang timbul diatas, Pemerintah Nagari telah berusaha untuk memperkecil permasalahan yang timbul antara lain :

1. Bersama masyarakat mencoba untuk menggali potensi yang dimiliki Nagari agar bermanfaat serta dapat memberikan dorongan untuk pergerakan roda Pemerintah Nagari.
2. Memberikan peluang dan kesempatan kepada Aparatur Nagari untuk menambah pengetahuan guna meningkatkan keahlian.
3. Untuk menumbuhkan dan menciptakan partisipasi dari masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah Nagari berusaha melibatkan masyarakat secara bersama-sama membangun nagari, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pembangunan yang berkelanjutan.

E. KERJASAMA DENGAN DENGAN PIHAK KE III

5.2.1. Kebijakan Dan Kegiatan

Dalam kegiatan kerja sama dengan pihak ketiga yang dilaksanakan oleh Nagari Taluk Tigo Sakato pada tahun 2019 lebih dititik beratkan pada kegiatan antara lain :

1. Bedah rumah tidak layak huni untuk keluarga miskin.
 2. Kegiatan Pada Lembaga- lembaga yang ada di Nagari Taluk Tigo Sakato
- Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan tidak lepas dari dukungan dan partisipasi dari pihak ke III seperti :

1. Perantau (dalam Provinsi maupun di luar Provinsi)
2. Pengusaha
3. Donatur lainnya yang tidak mengikat

5.2.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan di atas bantuan yang diterima oleh Pemerintahan Nagari dari pihak ke III yang tersebut diatas sangatlah memberikan dorongan dan motivasi guna suksesnya kegiatan tersebut diatas.

5.2.3. Permasalahan Dan Penyelesaian

Adapun permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dirasakan karena masih kurangnya minat dari putra nagari untuk mengikuti kegiatan tersebut. Untuk menindaklanjuti keterbatasan tersebut pihak Pemerintah Nagari akan berusaha untuk memberikan informasi dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang berkompeten dimasa yang akan datang.

RINGKASAN APB NAGARI TALUK TIGO SAKATO TAHUN 2019

U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
2	1	
PENDAPATAN	1.369.751.400	1.357.930.644,48
Pendapatan Asli Nagari		
Hasil Usaha Milik Nagari		
Badan Usaha Milik Nagari		
Tanah Kas Nagari		
dst.....		
Hasil Aset		
Pasar Nagari		
Tambatan Perahu		
Bangunan Milik Nagari		
Objek Rekreasi yang dikelola Nagari		
Pemandian Umum yang dikelola Nagari		
Hutan yang dikelola Nagari		
Tempat Pemancingan yang dikelola Nagari		
Tempat Pelelangan Ikan yang dikelola Nagari		
Hasil Lelang Kedaraan Dinas Wali Nagari yang lama		
Dst		
Hasil Gotong Royong Masyarakat Nagari		
Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah		
Retribusi Pelayanan Perizinan di Nagari		
Retribusi Pelayanan Jual Beli di Nagari		
Retribusi Pelayanan Administrasi surat menyurat/ leges dll		
Pungutan Nagari		
Iyuran Nagari		
dst.....		
Pendapatan Transfer	1.369.751.400	1.356.995.591,48
Dana Nagari	834.950.000	834.950.000
Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Kabupaten	31.913.800	19.157.991,48

Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Nagari	13.544.000	
Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Nagari	8.876.800	
Bagi Hasil PBB kepada Pemerintahan Nagari	9.493.000	
dst.....		
Alokasi Dana Nagari	452.887.600	452.887.600
Bantuan Keuangan		
Bantuan Keuangan dari Propinsi kepada Pemerintahan Nagari	50.000.000	50.000.000,00
Bantuan Keuangan dari Kabupaten kepada Pemerintahan Nagari		
Pendapatan Lain-lain		
Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat		
Hibah dari Pemerintah Kabupaten		
Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta		
Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan		
Sumbangan dari Perantau		
Sumbangan dari Perusahaan / Donatur		
Dst		
Lain-lain Pendapatan Nagari yang sah		
Pendapatan Bunga bank dari Rekening Nagari		935.053,00
Pendapatan dana cadangan		
JUMLAH PENDAPATAN	1.369.751.400	1.357.930.644,48

Taluk Tigo Sakato, Februari 2020
Wali Nagari Taluk Tigo Sakato,



BAB I

PENDAHULAN

Dengan berakhirnya pelaksanaan kinerja tahun anggaran 2019 maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007, pasal 13 ayat (2) tentang Pemerintahan Nagari mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari (LPPN) kepada Bupati di akhir masa jabatan dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada BAMUS Nagari.

LKPJ merupakan bentuk pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang telah dilaksanakan oleh Wali Nagari. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Kepada Masyarakat, menegaskan bahwa LKPJ Wali Nagari sekurang-kurangnya berisi penjelasan mengenai arah kebijakan umum Pemerintahan Nagari, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja Nagari, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan

1.1. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007 tentang Sistematika Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);

11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Peyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari khususnya pasal 8 ayat (20) s/d (8), bahwasanya Wali Nagari agar menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran (LKPJ) kepada BPRN dalam rapat paripurna BPRN.

1.2. GAMBARAN UMUM NAGARI

1.2.1. Kondisi Geografis

Nagari Taluk Tigo Sakato merupakan salah satu dari 9 Nagari yang berada dalam wilayah Kecamatan Batang Kapas yang letaknya sangat strategis dengan kekayaan alam yang cukup sebagai arel pertanian dan pekebunan.

Disamping daerahnya yang berhawa sejuk, tanah yang subur serta kehidupan yang saling menghargai masyarakat Nagari Taluk Tigo Sakato termasuk kedalam nagari yang memiliki integritas yang tinggi antar sesamanya.

Dengan jumlah penduduk 2.565 jiwa serta luas daerah $\pm$ 2.000 Ha. Di Nagari Taluk Tigo Sakato terdapat 3 Kampung, yakni :

1. Kampung Koto Keduduk
2. Kampung Tanjung Kandis
3. Kampung Koto Panjang

Secara geografis Nagari Taluk Tigo Sakato pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah Pertanian, Perkebunan dan Sungai dengan Air yang bersih dan pergunungan yang hijau menjulang tinggi menghadirkan pemandangan yang indah serta udara yang bersih dan sejuk.

1.2.2. Gambaran Umum Demografis

Secara Administratif Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sungai Nyalo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Koto Taratak
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Solok Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Taluk

1.2.1.1. Demografi

a) Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai kodrat, keahlian dan bidang kerjanya masing-masing.

Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan secara bijak akan menjadi beban pembangunan.

Berdasarkan data terakhir yang diterima dari Hasil Pendataan Penduduk melalui Data yang dihimpun masing – masing Kepala Kampung awal Tahun 2019, bahwa jumlah penduduk Nagari Taluk Tigo Sakato sebanyak +- 2.565 Jiwa. untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel sebagai berikut :

Jumlah Penduduk Nagari Taluk Tigo Sakato .

NO.	KAMPUNG	JUMLAH PENDUDUK
1	Koto Keduduk	1.072
2	Tanjung Kandis	1.023
3	Koto Panjang	515
	Jumlah	2.565

Sumber : Data Base Nagari Taluk Tigo Sakato

Dalam penyusunan Laporan keterangan pertanggung jawaban Nagari Taluk Tigo Sakato , data kondisi tentang sex ratio penduduk suatu Nagari mutlak diperlukan karena akan mempengaruhi terhadap beberapa kebijakan dan ataupun program yang akan ditetapkan.

Berdasarkan data terakhir yang diterima dari Hasil Pendataan Tahun 2019 bahwa sex ratio penduduk daerah Nagari Taluk Tigo Sakato adalah sebanyak 2.565 jiwa, dapat dilihat pada tabel adalah sebagai berikut :

Sex Ratio Penduduk Nagari Taluk Tigo Sakato

NO.	KAMPUNG	PENDUDUK			SEX RATIO
		L	P	TOTAL	
1	Koto Keduduk	498	529	1.027	
2	Tanjung Kandis	495	528	1.023	
3	Koto Panjang	241	274	515	
	Jumlah	1.234	1.331	2.565	

Sumber : Data Base Nagari Taluk Tigo Sakato

c) Kepadatan dan Penyebaran Penduduk

Kepadatan penduduk Nagari Taluk Tigo Sakato tergolong normal bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Nagari lainnya. Tingkat kepadatan penduduk Nagari Taluk Tigo Sakato menyebar di tiga kampung karena merupakan tempat kediaman dari sejak dahulunya.

d) Struktur Umur

Kondisi struktur umur penduduk Nagari Taluk Tigo Sakato sampai dengan akhir tahun 2018 tergolong komposisi struktur penduduk usia muda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Distribusi Kelompok Umur Penduduk Nagari Taluk Tigo Sakato

NO.	KELOMPOK UMUR	2019
1	0 – <1 Thn	84
2	1 – <5 Thn	82
3	5 - 6	163
4	7 - 15	474
5	16 - 21	381
6	22 - 59	1.031
7	60 - keatas	345
Jumlah		2.565

Sumber : Data Penduduk Nagari Taluk Tigo Sakato

e) Faktor-faktor yang Berpengaruh

Salah satu komponen utama kependudukan yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk adalah fertilitas. Fertilitas menyangkut banyaknya bayi atau anak lahir hidup yang dilahirkan oleh wanita atau sekelompok wanita.

Banyaknya anak yang dilahirkan akan membawa konsekuensi terhadap kesejahteraan rumah tangga. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumah tangganya. Bagi rumah tangga terutama dengan kondisi ekonomi yang lemah, maka pembatasan jumlah anak merupakan salah satu cara bagi tercapainya keluarga yang sejahtera. Dalam upaya melakukan pembatasan jumlah anak yang akan dilahirkan, maka penduduk wanita pada usia tertentu menjadi sasarannya. Usia tertentu yang dimaksudkan disini adalah usia antara 17-40 tahun.

Hal ini dikarenakan pada usia tersebut kemungkinan wanita melahirkan anak cukup besar. Wanita yang berada pada usia tersebut diatas, ini disebut wanita usia subur (WUS)

dan pasangan usia subur (PUS) bagi yang berstatus kawin. Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelahiran di suatu daerah adalah TFR (*Total Fertility Rate*) yang menggambarkan rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya.

Tingkat kelahiran yang terjadi di Nagari Taluk Tigo Sakato cenderung menurun dari waktu ke waktu, hal ini sebagai indikasi kesadaran untuk membatasi kelahiran semakin tinggi. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap tingginya tingkat kelahiran adalah usia perkawinan pertama terutama wanita, karena semakin muda seorang wanita menikah maka kemungkinan waktu untuk melahirkan semakin panjang.

Selain itu usia perkawinan juga berpengaruh terhadap stabilitas suatu keluarga, terhadap kesehatan diri sendiri, dan terhadap anak yang dilahirkan.

Semakin muda usia saat perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak karena belum siapnya fisik dan mental menghadapi masa kehamilan/kelahiran.

Demikian pula sebaliknya, semakin tua usia saat perkawinan pertama (*melebihi usia yang dianjurkan dalam program KB*), semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan/melahirkan.

1.2.1.2. Topografi

Topografi adalah gambaran tentang tingkat kemiringan dan ketinggian tanah dari permukaan laut. Kondisi kemiringan tanah merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesesuaian lahan untuk syarat tumbuh suatu tanaman.

Kondisi Nagari Taluk Taluk Tigo Sakato relatif masih sangat potensial untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan dan juga Pariwisata. Karena disamping budidaya pertanian dan perkebunan rakyat yang dilakukan masyarakat masih tergolong tradisional dan semi teknis juga masih ditemukan adanya lahan-lahan tidur yang dapat ditingkatkan sebagai lahan produktif. Hutan dan perkebunan yang memberikan kontribusi yang cukup baik pada masyarakat belum dikelola secara baik dan maksimal, hal ini disebabkan Perkebunan yang ada masih bersifat tradisional serta kekayaan alam yang sangat melimpah belum memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.2.1.3. Hidrologi

Hidrologi adalah gambaran air sungai yang mengalir atau pun melintasi suatu daerah tertentu. Aliran sungai yang melintasi Nagari Taluk Tigo Sakato telah memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi Masyarakat, sebab merupakan sumber irigasi bagi lahan pertanian masyarakat Nagari Taluk Tigo Sakato dan bahkan pada musim tertentu (hujan) air sungai

bisa menimbulkan bencana banjir bagi masyarakat yang memrendam daerah pemukiman serta lahan pertanian masyarakat. Aliran sungai yang melintasi Nagari Taluk Tigo Sakato sudah dimanfaatkan secara baik sebagai sumber ekonomi masyarakat umum yakni sebagai sumber pengairan lahan pertanian dan Perikanan (Kolom Ikan) milik Nagari yang saat ini dikelola oleh BUMNag PINCURAN TUJUH.

1.2.1.4. Sejarah Pemerintahan Nagari

Wali Nagari yang menjabat sebagai Wali Nagari Taluk Tigo Sakato sejak dimekarkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 9 Tahun 2011, tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato di Kecamatan Batang Kapas, sampai sekarang dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

NO	NAMA	SUKU	PERIODE PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
1	AFRIJON, SH	Melayu	Pemekaran Nagari	S.I
2	EFRIADI, S.Ag	Sikumbang	1 Januari 2012 – Desember 2017	S.I
3	RAJA RATMAN, SE	Piliang	Pj. Wali Nagari	S.I
4	NOFRIANDI	Panai	Periode Pertama (6 Tahun 2018 -2024)	SLTA

1.2.1.5. Asal Usul / Legenda Nagari

Wali Nagari yang menjabat sebagai Wali Nagari Taluk Tigo Sakato sejak kembali ke Pemerintahan Nagari melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 9 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari, tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato di Kecamatan Batang Kapas sampai sekarang dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

NO	NAMA	SUKU	PERIODE PEMERINTAN	PENDIDIKAN
1	AFRIJON, SH	Melayu	Pemekaran Nagari	S I
2	EFRIADI, S.Ag	Sikumbang	1 Januari 2012 – Desember 2017	S I
3	RAJA RATMAN, SE	Piliang	Pj. Wali Nagari	S I
4	NOFRIANDI	Panai	Periode Pertama (6Tahun) 2018 - 2024	SLTA

1.2.1.5. Asal Usul / Legenda Nagari

1. Sejarah Nagari

Asal mulanya Nagari Taluk Tigo Sakato adalah mekaran dari Nagari Taluk yang bersumber dari Legenda Sungai Tuak ada ungkapan yang mengatakan bahwa nama Nagari diambil dari kata TALUK dengan Ketua Kerapatan Adat Ibu Abbas Dt. R Bagindo. Konon orang Portugis pernah datang kesitu. Penduduk Pesisir Selatan umumnya menyambut orang Portugis dengan sebutan UPIK atau RUQIK dalam Kab Nangombang orang Portugis disebut Raja Sipetoka orangnya berbadan Besar dan tinggi pada mulanya mereka berdagang secara murni di Taluk tapi kelamaan memaksa menjual barangnya dan membeli hasil Bumi dengan harga yang ditentukanya. kemudian mereka merampas, apa saja barang –barang merekamau.

Karena masyarakat Talukmulaimelawandansering terjadi sangketa dan kerusuhan.maka dicari aka, bagaimana membunuh orang besar –besar seperti itu, akhirnya pemimpin menemui cara cara yang tepat dan sangat dirahasiakan.

Pemimpin Taluk mengundang Portugis untuk berunding tujuanya untuk menghindari sangketa dan untuk melancarkan kehendak orang Upik itu tampusangketa dan akhirnya orang Upik setuju.

TALUK MASA BUKIT SIGADIANG

(SEKITAR 1.000 MASEHI)

Dibawah akan dijelaskan ;

1. Lokasi dan masa berlangsungnya pemungkiman Bukit Si gadiang.
2. Garis Pantaimasa Bukit Si Gadiang
3. Asal mula penduduk Taluk

GARIS PANTAI MASA BUKIT SI GADIANG

Kalau kita teliti cerita Rakyat tentang Batu Gulung Kasur, memberitahu kepada kita bahwa dulu hampir semua Tanah Taluk digenangi Laut. sawah –sawah dan perkampungan sekarang, dahulunya laut, kalau demikian halnya tentu Bukit Lintang dan Bukit Rawang dahulunya merupakan suatu Pulau.

Menurut cerita itu garis apantai berada di kaki – kaki Bukit, sehingga membentuk Teluk yang jauh menjorot ke Darat. Inilah bentuk Bumi Taluk pertama dan ini pula asal mula Nagari ini bernama Taluk, yaitu dari kata Teluk Cerita Rakyat Batu Gulung Kasur mengenai garais pantai, mungkin dapat di percaya karena pantai kita ini sekarang memang bertambah jauh ke barat dari masa dahulu.

PERPINDAHAN PENDUDUK

Sekitar Tahun 1.000 Masehi Kerajaan Sriwijaya sering menyerang dan mendesak kerajaan melayu sampai-sampai ke hulu Jambi yaitu sekitar Bangko – Kerinci (ada Prasati ditemukan disekitar Bangko tentang ini) mungkin itu sebabnya banyak orang Melayu mengungsi lebih jauh ke hulu, antara lain ke sungai Pagu. kemudian dari sungai Pagu mereka menemukan puncak Bukit Barisan, yaitu hulu sungai Ang mengalir ke Barat (Lautan Hindia)

Lewat hulu sungai itulah mereka sampai ke Kambang lewat Batang Lengayang, atau sampai ke Langgai lewat Batang Surantiah. dari Kedua aliran sungai ini Nenek Moyang Taluk dari Sungai Pagu pindah ke Taluk. Rombongan ini adalah gelombang pertama yang masuk lewat Hulu sungai mereka pindah secara berangsur – angsur dan ampuluh dan bahkan Ratusan Tahun mereka hidup bersawah atau berladang.

Gelombang Kedua datang dari Utara, yaitu dari padang, Painan, Kampung Ladang Taluak Kasai, Sapan, Limau Mani dan sebagainya mereka masuk lewat perjalanan Darat dan Pantai.

Zaman moderen ini, ada yang datang dari IV Koto Mudiek, IV Koto Ilir dan Pariaman dari Kerinci, dari Indopuro dan banyak lagi mereka menetap dan hidup di Taluk.

MASA PEMERINTAHAN RIMBO APA (SEKITAR 1.500 MASEHI)

Dibawah ini akan di ceritakan

1. Letak Rimbo Apa
2. Pembentukan Nagari buat pertama kali
3. Bentuk Pemerintahan
4. waktu dan keadaan Bumi Taluk masa Rimbo Apa
5. legenda Malain Deman

Rimbo Apa terletak dipinggir sungai tempat pertemuan Dua Sungai yaitu sungai Tanjung Kandis dan Sungai Koto Panjang. Rimbo Apa, ibarat Euftrat dan Tigrisnya Baylonia di Timur Tengah. Tentu disana tempatnya subur nyatanya sekarang hampir semua lahan menjadi sawah.

Disitu juga dahuunya tempat pertemuan dua jalan yaitunya Jalan dari Koto Panjang dan Jalan dari Tanjung Kandis. tempat itu persimpangan dan pertemua, karena itu nenek moyang Taluk memilih tempat itu sebagai pusat Pemerintahan Nagari.

Pada Zaman Rimbo Apa ini Taluk diakui sebagai sebuah Nagari oleh Sungai Pagu. Sungai Pagu ketika itu mendapat Limpahan wewenang dari pagaruyung untuk mengurus

Nagari -- nagari di banda X. Bukan banda X saja, bahkan semua daerah yang jauh letaknya dari pagaruyung diserahkan kepada sungai Pagu daerah jauh itu disebut Rantau.

BENTUK PEMERINTAHAN NAGARI

(MASA RIMBO APA)

Kepala Pemerintahan di pegang oleh seorang yang bergelar PAMUNCAK, beliau dipilih oleh Kerapatan Adat dihadiri para penghulu. Penghulu hanya 4 orang saja, keempat penghulu tadi membantu Pamunca, Pemuncak Langsung bertanggung jawab kepada penguasa Sungai Pagu.

Untuk mengurus Pemerintahan Nagari Taluk diapa dibangun di Balai sebanyak Dua buah. satu untuk tempat berunding (Balai) dan satu lagi Kantor Pamuncak. disana segala pendapat ditempa karena itu disebut Apa. kata ini di ambil dari pandai besi.

Menurut Idrus Dt. Rajo Bandaro (Tgl 15 -2 - 1962) sejak zaman apa sampai dengan Tahun 1914, di Taluk dikenal Empat orang penghulu dengan sebutan Penghulu Nan Barampek .mereka pembantu Pemuncak untuk melaksanakan Pemerintah. Penghulu Nan Barampek yang berunding di apa bersama Pamuncak.

Suku ketika itu belum terbagi seperti sekarang memang suku – suku sebenarnya dari tempat asal telah terbagi seperti Kampai, ada Kampai Nyiur Gading, Kampai Tanggah dan Kampai Sawah Laweh. Namaun karena ketika itu kaum di Taluk masih sedikit semua kampai disatukan saja begitu juga dengan Panai, Sikumbang dan Melayu.

Panghulu Nan Barampek itu terdiri dari :

1. utusan kampai nan tigo lambang, terdiri dari Kampai Tanggah (RajoBandaro), Kampai Sawah Laweh (Lambuik Kayo), dan Kampai Nyiur Gading (Rajo Bagindo)
2. utusan Melayu Nan Ampek Nyiyiak terdiri dari Melayu Durian (TanLarangan), Melayu Tanggah (Tambarain), dan Melayu Koto Kaciak (Bandaro Sati). Yang satu lagi taktersebutkan mungkin bergabung dengan yang lain.
3. Utusan Panai Nan Tigo Ibu terdiri dari Panai Lundang (Mangkudun), Panai Tangah (Rajo Alam), Panai Tanjung (Rajo Batuah)
4. Utusan Nan Tigo Lareh terdiri dari Sikumbang Malin Mansiang (Rajo Kayo), Sikumbang Gadang Rajo (Malenggang) Caniago (Rajo Gamunyang) dan Jambak (Bandaro Sutan)

LEGENDA MALINDEMAN

Pada maso apa dipertemukan Dua Sungai di Apa hidup keluarga Suku Kampai Sungai Koto Panjang lah yang jernih Airnya karena itu di Muaro Sungai Koto Panjang ada tepian tempat mandi disitulah para perempuan mandi, mencuci dan mengambil air setiap pagi dan petang.

Pada suatu hari ada upacara turun mandi sorang anak bernama Malin Deman. Ketika Bayi Malin Deman di mandikan selembur rambut panjang membalut kepalanya, orang bertanya – tanya rambut – rambut siapa gerangan dan Rambut tersebut di simpan oleh ibu Malin Deman.

Setelah beranjak Dewasa ibunya memberikan rambut itu kepada Malin Deman Rindu ingin bertemu dengan si empunya Rambut ia sering melalalang ke Koto Panjang sebagai hulu dari Sungai Rimbo Apa.

Akhirnya ia mendapat petunjuk bahwa dihulu sungai Koto Panjang tempat kampung lama Pancuran Tujuh, sering putri Tujuh turun mandi ke kolom pincuran tersebut di sana ada mande Rubiah merupakan tempat mengaduh putru Tujuh sedang berada di mungka Bumi.

Ketika Putri Tujuh sedang Mandi Malin mengintip ke Pincuran Tujuh melihat Putri nan Tujuh sedang mandi – mandi dari yang Tujuh dia melihat seorang yang bungsu adalah yang paling cocok sebagai pemilik Rambut malin mengambil pakain terbang yang disebut pakain sosong Barat milik Putri Bungsu, kemudian di bawah pulang kerumah mande. putri bungsu di tinggal sama kakaknya mereka telah terbang kembalike langit, sedangkan putri bungsu tinggal dan mengaduh kepada mande Rubiah, Mande memperkenalkan Malin kepada Putri dan akhirnya mereka menikah dan mempunyai satu orang anak yang bernama Malin Duano. Sosong Barat dikembalikan kepada putri bungsu dan kembali ke langit.

Di persingkat cerita sampainya di kampung Koto Panjang ada Kuda malin Deman manjadi batu sampai saat sekarang menjadi sejarah bahwasanya Pincuran Tujuh dan Batu Kudo yang ada di Koto Panjang adalah memiliki Sejarah Jaman dahulunya.

ZAMAN PAMUNCAK

(1800 – 1914)

a. Keadaan Alam Taluk

sungai di Balai Lamo mangkin mendangkal perahu tidak lagi dapat berlabuh dekat pasar. Dimuaro terjadi Delat menutup pintu kelaut dari padang orang menaiki Bukit Gelangang Raun di Selatan Padang menuju Tarusan dari Tarusan menyisir pantai ke Painan, dari painan lewat pencoran Boga menaiki dan memotong Bukit Batu Biawak menuju sungai Nipa terus ke Kuok.

b. Jembatan dan lalu lintas

Jalan ketanjung kandis dandari koto panjang ketika itu bertemu di Rimbo Apa kemudian hanya ada satu jembatan untuk penyebrangan ke Koto Keduduk. Jalan ke Ujung Batu semula adalah dari ujung Tanah (Kampung Jambak) menuju Kampung Sawah terus Ujung Batu.

c Keunikan Pasar Taluk

Setelah Balai Lamo pasar pindah ke pasar sekarang (sekita 1880) namuni belum satu pun los atau bangunan lain berdiri secara permanen. Orang berjualan dibawahnya Pohon Lansano ada 14 Pohon mengelilingi pasar.

Konon, menurut kepercayaan orang waktu itu yang datang berlanja orang bunian orang yang tidak kelihatan. Pernyataan kita mereka belanja apa dan membeli dari siapa dan siapa yang menjual.

d Mesjid dagang

Orang sudah mulai banyak melewati jalan Darat disamping Jalur laut, oleh Pemerintahan Kloniel jalan Tikus dilebarkan sehingga pedati untuk beberapa pegalihan jalansudah mulai digunakan. untuk menampung anak dagang dalam perjalanan di bangun mesjid di pingir sungai air pasang itilah mesjid di air Pasang sekarang.

E Kedudukan Pasar

Pasar belum sederajad dengan Koto dalam administrasi pemerintahan ketika itu ada Koto, yaitu Koto Panjang, Koto Keduduk dan Koto Kandis sedangkan Uba Taluk Dalam dan Tanjung Durian.

F Mesjid Raya Taluk

Jauh sebelum Mesjid Dagang dekat Air Pasang di Bangun Mesjid Raya Taluk di Koto Keduduk telah ada, belum ada orang Tua Taluk yang dapat memperkirakan bila mana mesjid Raya itu di bangun antara abad 17 dan abad 18. orang Tua Taluk hanya bisa menjelaskan bahwa mesjid itu Rehab oleh Muncak Kidam pada masa pemerintahanya.

G Bentuk Pemerintahan***Semasa Muncak***

Demikianlah suasana Taluk seperti yang di jelaskannya di atas tadi, ketika akan memasuki masa Pemerintahan Muncak, yang merupakan awal. jauh sebelum Mesjid Dagang dekat air Pasang dibangun, Mesjid Raya Taluk di Koto Keduduk telah ada sebelum ada orang Tua Taluk yang dapat memperkirakan bilamana masjid Raya itu di bangun.

H Bentuk Pemerintahan

Semasa Pamuncak

Ketika akan memasuki masa Pemerintahan Muncak yang merupakan awal dari Pemerintahan Kolonial Belanda sebagai penerus kekuasaan VOC. sejak VOC bubar karena korupsi pada Tahun 1779 Pemerintahan Kolonial Belanda yang diurus dari Negeri Belanda di Eropa.

URUTAN NAMA – NAMA PAMUNCAK DI TALUK

PAMUNCAK KAJOIMA

1840 -1860

Pamuncak ini di perkirakan memerintah di Taluk antara Tahun 1840 – 1860 hal ini dihitung –hitung berdasarkan jumlah generasi oleh Ayek Imam Badak.

MUNCAK TABUH TUAH TANMAJALELO

ALIAS MUNCAKDI PARID

1860 – 1889

Masih keterangan dari Ayek Imam Badak Muncak Tabuh Tuah Tan Majo Lelo, seperti Nama” Tuah “ memenag pemberani orang Segan kepadanya. Muncak yang berasal dari suku Sikumbang ini bergelar pula muncak diparid nama itu ada sebabnya. Pada masa pemerintahan beliau itu pasar yang masih berupalapangan berumput di bawah teduhan pohon Lansano itu, sering di genangi banjir yang mengalir dari Rimbo Apa.

MUNCAK KIDAM 1889 – 19899

Muncak Kidam di jelaskan oleh Ayek kali Imam Pasah kata beliau Muncak Kidam mulai memerintah 6 Tahun sesudah Gunung Karakatau meletus, kalau menurut Bahasa Ayek Kali Enam Tahun sesudah Galoroh Naik. dengan demikian kita dapat memperhitungkan yaitu 6 Tahun sesudah 1883 jadi muncak Kidam mulai memerintah pada Tahun 1889. Ayek Kidam Imam Pasa mengatakan bahwa Muncak Kidam itu mempunyai Kuda Hitam sebagai kenderaaan Dinas dan Istri beliau Dua, yang satudi Ujung Batu.

MUNCAK NAHU RAJO KAYO

(1891 – 1900)

Muncak ini dipilih segera sebagai pengganti Muncak Mantan, Muncak Nahu dari Suku Sikumbang perhatiannya lebih banyak keagama. surau Suluk di Tanjung Kandis dimanjukan

Masjid Raya Koto Keduduk yang masih beratap Rumbia beliau dengan atap Ijuk. Karena perhatian beliau lebih banyak kepada Tasauf.

MUNCAK KANITSAMPO NO BATUA

(1900 -1907)

Muncak pengganti Muncak Nahu ini berasal dari Suku Kampai Nyiur Gadiang beliau yang mengganti atap Ijuk Masjid Raya Koto Keduduk dengan Atap Seng. pada masa itu jalan kecil menghubungi padang dengan banda X mulai ada namun mobil belum masuk. Perdagangan lewat darat mulai mengeser perdagangan melalui laut akibatnya muara atau pelabuhan yang selama ini ramai dikunjungi sekarang mulai sepi.

MUNCAK JAMIL PANDUKO RAJO

(1907 – 1914)

Orang mengelari beliau Muncak Lunce karenapada masa beliaulah berakhir semua jabatan Muncak. Sudah terlanjur tidak dipakailagi ada nama baru sebagai pengganti gelar Muncak yaitu Penghulu Kepala (Angku Palo) ketika itu ada pembaruan Pemerintahan Belanda hendak melaksanakan Politik Etis, atau Politik Balas Jasa, pada semua itu adalah tipu muslihat Belanda semua gerakan itu sebenarnya untuk kepetingan Kaum kapasitas Belanda yang hendak masuk ke Indonesia.

Nagari pulang ke Adat

Diminang kabau di kampanyekan Ngaari pulang ke Adat artinya yang memerintah di Nagari Kaum Adat. orang minang sangat gembira terutama kaum adat atau para penghulu sebab penghulu akan memerintahkan sendiri kemanakanya dan salah seorang penghulu akan menjadi penghulu kepada penghulu kepala ini akan memerintahkan Nagari Belanda katanya hanya pelindungan dan penjaga keamanan. jabatan di atas penghulu Kepala diangkat seorang Demang juga berasal salah seorang Datuak di antaranya Penghulu kepala tadi namanya Deang Adat

MASA PEMERINTAHAN

WALINAGARI M. JINIR

1976 – 1982

Let. Pol M. Jinir meneruskan dan menyempurnakan Reset Lemen pembaruan tempat Tinggal Pasir Indah Harapan. Jalan – jalan di buat pengavling dijalankan terus dan penduduk mulai membangun rumah dan menghuninya. Bayangan pantai pasir yang menangkutkan

karena kepercayaan adanya Jin Lawik yang mengangu, makin menipis maka penduduk mungkin ramai menepatinya.

Dismaping itu Wali Nagari berhasil memperkecil atau menekan budaya Judi di Taluk suatu pemandangan yang sangat menyedihkan kalau beberapa lapau berubah fungsi menjadi tempat perjudia. wali Nagari Jinir berhasil ” Mensunyikan “ perjudian dalam masa pemerintahnya.

MASA PEMERINTAHAN WALI NAGARI MAHRUS RAJO BANDARO 1982 – 1985

Pengembangan Kampung Pasir

pada waktu perkampungan di pasir sudah merata di diami penduduk yang pindah dari berbagai kota seperti disebut diatas, bukan Pasir saja menjadi sasaran tempat tinggal aru penduduk Taluk juga Rimboh Tanggah, Ujunag Au, Limpaso dan sepanjang Jalan Raya.

Dipasir dibuat jalandan Polongan dan penduduk mulai menanam kelapa pernah juga sekali menanam Jeruk, pasir merupakan wilayah paling enak untuk Jeruk waktu itu dan Pasir menjadi daya tarik untuk perbaikan perekonomian, orang kadang – kadang menjual Tanah permahanya seperti di Koto Keduduk atau Koto Panjang kemudian mengantinya dengan membeli Tanah di Pasir.

Kampung Uba di Puncak Bukit, dipindahkan Pertama memilih lokasi dekat Mesjid Koto Kedudu. kemudian setelah pasir di buka dinyatakan Kampung Uba .sehingga ketika Desa – desa dibentuk pada Tahun 1991 Limpaso mempunyai nama baru yaitu Uba – Limpaso.

MASA PEMERINTAHAN LET.POLMJINIR KE 2 1985 – 1990

Perhatian Wali Nagari kepada Bidang Pemasaran pasar menjadi sasaran di pasar banyak sekali Kotoran binatang terutama Jawi, Pasar telah menjadi kandang Jawi di malam hari Wali Nagari mulai menertipkan Ternak.

Agar pasar di jagaoleh banyak orang maka disebagian sisi pasar di buat Kios seperti Tokoh untuk disewakan kepada pedagang.sasaranya adalah sisi utara dan sisi Timur dan Tanah pasar sebenarnya kearah ini telah dimulai juga oleh Nagari sebelumnya.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah No.17 Tahun 2001, dimana Pemerintah Terendah di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Nagari.maka Pemerintahan Desa kembali menjadi sebuah

Nagari, melalui kesepakatan pemuka masyarakat dan KAN Nagari maka di angkat Bapak AFRIJON, SH menjadi Penjabat sementara Wali Nagari Taluk Tigo Sakato.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2011, Tentang pembentukan Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato, kemudian pada Tanggal 8 Desember 2011 dilaksanakan Pemilihan Wali Nagari Devinitif. Berdasarkan Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140 / 272 /Kpts / BPT – PS / 2018 tentang pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Se – Kecamatan Batang Kapas. Tanggal 11 Mei 2018 dilantik Wali Nagari terpilih yaitu Bapak NOFRIANDI, sebagai Wali Nagari Taluk Tigo Sakato. sampai saat ini. demikianlah sejarah singkat terbentuknya Nagari Taluk Tigo Sakato.

2. Demografi

1 Kondisi Umum Nagari Taluk Tigo Sakato.

Akeadaan Fisik / Geografis Nagari

1. Batas Wilayah

- Sebelah Utara : berbatas dengan Nagari Sungai Nyalo
- Sebelah Selatan : berbatas sepadan dengan Ngaari Koto Taratak
- Sebelah Barat : berbatas sepadan dengan Nagari Taluk
- Sebelah Timur : berbatas sepadang dengan Kabupaten Solok Selatan.

2. Luas Wilayah

- Luas Wilayah	2.000 Ha
1. Areal Budi Daya	
a. Sawah beririgasi teknis	-
b. Sawah Irigasi ½ Teknis	160 Ha
c. Sawah Tanah Hujan	70 Ha
d. Perkebunan	88 Ha
e. Kolom / Tambak	0,6 Ha
f. DII	
2. Areal Pemukiman	215 Ha
3. Hutan Negara / Hutan Lindung	3.558 Ha
4. Hutan Rakyat	989 Ha
5. Areal SosialBudaya	
a. Pasar	-
b. Jalan	10,2 Ha
c. Kantor / Sekolah	5 Ha

- d. Lapangan Olah Raga 15 Ha
- e. Tempat Ibadah 0,9 Ha
- f. DII

6. Areal peruntukan Lahan

3. Keadaan Topografi Nagari

Secara umum keadaan Topografi Nagari Taluk Tigo Sakato adalah merupakan Daerah perbukitan / dataran Tinggi. Sedangkan Iklim Nagari Taluk Tigo Sakato sebagaimana Nagari lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola Tanaman yang ada di Nagari Taluk Tigo Sakato kecamatan Batang Kapas.

4. Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari

Nagari	Kampung
1	3 (Tiga) : 1. Kampung Koto Keduduk 2. Kampung Tanjung Kandis 3. Kampung Koto Panjang

3 Keadaan Sosial

Jumlah penduduk Nagari Taluk Tigo Sakato adalah 571 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 2.546 Jiwa terdiri dari laki – laki 1.215 orang dan Perempuan sebanyak 1.331 Orang. Tingkat pendidikan cukup tinggi, rata – rata masyarakat Tamatan SLTA dan banyak yang Tamatan Perguruan Tinggi. Jumlah sarana pendidikan formal adalah sebagai berikut :

- 1. SD / Sederajat : 3 Unit
- 2. SMP / Sederajat ; -
- 3. SMA / Sederajat ; -

Bidang Keagamaan 1000 0/0 masyarakat Taluk Tigo Sakato menganut agama Islam dan Toleransi sesama pemeluk pada kegiatan agama terbentuk majelis Ta'lim pada setiap Mesjid. Untuk pendidikan sarana Ibadah Mushallah dan Mesjid yang dibangun secara swadaya.

Masyarakat Nagari Taluk Tigo Sakato merupakan masyarakat HOMOGEN KETURUNAN Etnis Minang Kabau, masyarakat masih memiliki kekerabatan yang kuat dan diatur di bawah lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Perkembangan Organisasi sosial kemasyarakatan Nagari Taluk Tigo Sakato berkembang dengan baik terlihat dengan banyaknya kelompok - kelompok budaya dan kesenian Tradisional yang tumbuh di masing – masing kampung

4 Keadaan Ekonomi

Pada bidang Perekonomian pada umumnya masyarakat Hidup sebagai petani dan Buruh Tani sebagian lagi bergerak di Bidang perdagangan, jasa dan sebagai PNS. Usaha pertanian yang paling Dominan adalah Komoniti Padi Sawah dengan rata –rata usaha sawah 2 kali setahun dan tingkat Produksi 5 – 5 , 5 Ton / Ha. Usaha perkebunan adalah Durian, Gambir, Karet dan sawit serta perternakan Sapi. Usaha pertanian ini masih dikelola secara Tradisional dan Kurang intensif.

Pada Tahun 2006 di Nagari Taluk Tigo Sakato masyarakat Mulai gencar menanam Tanaman Karet, Gambir, Sawit dan sekarang telah berproduksi. Pada laghan lading (Huma) disepanjang aliran sungai banyak digarap oleh masyarakat dengan tanaman Kacang, Jagung dan sayur – sayuran. Untuk lebih jelasnya mengenai ekonomi masyarakat dapat di uraikan sebagai berikut :

a) Jumlah Penduduk 571 KK dengan Jumlah Jiwa 2.546 Jiwa

Laki –laki	Perempuan	Jumlah
1.215	1.331	2.546

b) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat ; (dalam KK / Jiwa)

Kaya	Sedang	Kurang Mampu
98 kk / Jiwa	272 kk / Jiwa	201 kk / Jiwa

c) Tingkat Pendidikan

Tidak Tamat SD	SD	SMP	SLTA	Serjana
75	259	293	358	102

d) Mata Pencarian

Karena Nagari Taluk Tigo Sakato merupakan Daerah Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani.

Usia Produktif	686 Jiwa
Usia Non Produktif	1.860 Jiwa

e) Pola Penggunaan Tanah

penggunaan Tanah di Nagari Taluk Tago Sakato sebagian besar diperuntukan untuk Tanah Pertanian Sawah dan Perkebunan, sedangkan sisanya untuk Tanah kering yang merupakan bangunan dan Fasilitas – fasilitas lainnya.

f) Pemilik Ternak

Jumlah kepemilikan Hewan Ternak oleh Penduduk Nagari Taluk Tigo Sakato berjumlah 13.280 ekor terdiri dari Kerbau, Sapi, Kambing dan Ayam / Itik.

g) Jenis dan Luas peruntukan Lahan :

NO	PERUNTUKANLAHAN	LUAS (Ha)	KET
1	Areal Budi Daya		
	a. Sawah beririgasi Teknis	281	
	b. Sawah Irigasi ½ Teknis	36	
	c. Sawah Tanda Hujan	60	
	d. Perkebunan / Lahan	727	
2	Areal Permungkiman	145	
3	Hutan Negara /HutanLindung)	1.675	
4	HutanRakyat	255	

1.2.5. Kelembagaan Nagari

Lembaga-lembaga yang ada di Nagari Taluk Tigo Sakato seperti BAMUS Nagari, LPMN, PKK, Bundo Kanduang, Pemuda, FKPM, cukup berjalan sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing lembaga, sehingga kita masih harus memperkuat dan menjalin kerjasama dalam membantu kelancaran pelaksanaan Pembangunan di Nagari Taluk Tigo Sakato, adapun struktur pengurus dari lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut :

a) Pemerintahan Nagari

NO	N A M A	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4
1	NOFRIAND	Wali Nagari	SLTA
2	ILNASDI	Sekretaris Nagari	SMEA
3	YAYAN KURNIAWAN	Kasi. Pemerintahan	SLTA
4	ERMAYENTI	Kasi Kesra	SLTA
5	ZARLIA MIZA, S.TP	Kaur Perencanaan dan Keuangan	S.I
6	NORA MARDANI, ST	Kaur Tata Usaha& Umum	S.I
7	SELVIA DONA,S.Pd I	Kaur Keuangan	S.I
8	ANDARI AFANI	Staf	SLTA
9	MITA SAFITRI, S,Pd	Staf	SI
10	RISMANTON,SH	Staf	SI
11	SYAFRIANDI	Kepala Kampung Koto Keduduk	SLTA
12	YULKISMAN	Kepala Kampung Tanjung Kandis	SLTA
13	BUSRIWANDRI	Kepala Kampung Koto Panjang	SLTA

b) *Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI)*

BAMUS NAGARI yang merupakan komponen Pemerintahan Nagari, senantiasa mengupayakan terciptanya suasana yang kondusif guna mendukung terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Nagari dengan baik, serta merangsang tumbuh dan berkembangnya kreasi peran serta masyarakat yang sehat dan dinamis dalam pembangunan Nagari.

Selama Tahun 2019 BAMUS telah menunjukkan kinerja yang baik disamping mampu menjembatani pihak eksekutif, masyarakat dan memberikan pengertian serta penjelasan program Nagari.

Struktur pengurus dari BAMUS NAGARI adalah sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4
1	NASIR	Ketua	SLTA
2	UMAR.P.BANDARO SUTAN	Wakil Ketua	SLTA
3	DELIS.P.MANGKUDUN	Sekretaris	SLTA
4	SANTI DEWI	Anggota	SLTA
5	DAVITSON	Anggota	SLTA

c) *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)*

Ketua umum : ZAINAL .L. KAYO
 Ketua I : SYAFRIL
 Ketua II : ASRIL.M
 Sekretaris : SUARDI,AR
 Bendahara : ELI MARNI

SEKSI :

1. AGAMA

Ketua : ABU BAKAR
 Anggota : KAFRIATI
 Anggota :

2. Adat Dan Budaya

Ketua : IM.BASRI
 Anggota : NURSIDA
 Anggota :

3. Kesehatan

Ketua : HERIFESNI, Amd.Keb
 Anggota : IRAMAYENI
 Anggota :

4. Pendidikan

Ketua : WINDA ZULDAWATI,S.Pd
Anggota : ERITA SRI SUPRENI
Anggota :

5. Perekonomian

Ketua : NARIS
Anggota : EDRITER
Anggota :

6. Sarana dan Prasarana Fisik

Ketua : RISMAN SAID
Anggota : DUL AMRI
Anggota :

7. Olahraga dan Generasi Muda

Ketua : KARDION
Anggota : ROSPIDA
Anggota :

8. Ketentraman dan Ketertiban

Ketua : WENDRA
Anggota : ARPENDI
Anggota :

9. Lingkungan Hidup

Ketua : YURNELI
Anggota : YULIA VALENTINA
Anggota :

10. PKK

Ketua : RAHMA YULELNI
Anggota : MIMI ARIYATI
Anggota :

d) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, dimana telah dilaksanakan otonomi daerah, berdasarkan Undang-undang no. 22 tahun 1999 dan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 28 tahun 1984 tentang pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), yang disempurnakan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 53 tahun 2000 tentang pedoman umum gerakan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin menuju terwujudnya keluarga yang bahagia, sejahtera, maju, mandiri hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi oleh keimanan dan ketagwaan pada Tuhan Yang Maha Esa.

Sasaran gerakan PKK Nagari Taluk Tigo Sakato adalah keluarga yang ada di Kampung-kampung dalam Nagari Taluk Tigo Sakato, melalui bermacam-macam kegiatan yang tercakup dalam sepuluh program pokok PKK disesuaikan dan dilaksanakan oleh 4 Pokja. Yang dirasakan dalam setiap pertemuan yaitu, minimnya pengetahuan para ibu-ibu baik sebagai peserta maupun pembinaan dari Nagari, sehingganya kami mendatangkan nara sumber dari Kecamatan dan Kabupaten

Adapun struktur kelembagaan dari PKK adalah sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4
1	NY. RISMANENTI,S.Pd	Ketua Umum	S.I
2	NY. NURSIDA	Ketua I	SLTA
3	NY. NOVA SUSRIANTI	Sekretaris	SLTA
4	RISMANTON,SH	Sekretaris II	S. 1
5	ERMAYENTI	Bendahara	SLTA
6	FARIDA ARIYANI, S.Pd	Ketua Pokja I	S.I
7	ERNIDA	Sekretaris Pokja I	SLTA
8	ELVIRA ROZA YUNITA	Anggota Pokja I	SLTA
9	NY.WANDA OKTASARI,S.Pd.I	Ketua Pokja II	S.I
10	NY. NENENG SURYANI	Sekretaris Pokja II	SLTA
11	NY.YULIA	Anggota Pokja II	SLTA
12	NY.WINDA ZULDAWATI,S.Pd	Ketua Pokja III	S.I
13	NY.ROMIANA	Sekretaris Pokja III	SLTA
14	NY.NORA SUSANTI	Anggota Pokja III	SLTA
15	NY.RAHMAYULELNI	Ketua Pokja IV	SLTA
16	NY.RAHIMARISKA	Sekretaris Pokja IV	SLTA
17	NY.ELFITRI YANTI	Anggota Pokja IV	SLTA

a. Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)

Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Nagari Taluk Tigo Sakato, belum ada perubahan sehingga masih terdapat personil lama, meskipun sudah ada perubahan posisi dari setiap orangnya seperti wakil Ketua yang dari unsur Babinkamtibmas sudah pindah tugas. Demikian juga personil lainnya.

Ketua	:	ASRILSAID
Wk. Ketua	:	Briptu . REFFI (Babin Kantibmas Nagari Taluk Tigo Sakato)
Sekretaris	:	SUARDI,AR

Wk. Sekretaris	:	ARPENDI
Bendahara	:	ROSPIDA
Anggota	:	1. Deprizal 2. Paryono 3. Usman 4. Ipel 5. Erlinda 6. Ilnasdi 7. Nasir 8. Syafriandi 9. Yulkisman 10. Busriwandri 11. Irma dewi 12. Defriwal 13. Ermayenti 14. Asril, M 15. Riri Muspaleni, S.Pd

PERATURAN NAGARI TALUK TIGO SAKATO TAHUN 2019

1. Peraturan Nagari Taluk Tigo Sakato No. 01 tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Nagari Taluk Tigo Sakato
2. Peraturan Nagari Taluk Tigo Sakato No. 02 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019.
3. Peraturan Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taluk Tigo Sakato Tahun Anggaran 2019.
4. Peraturan Nagari Taluk Tigo Sakato No. 04 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taluk Tigo Sakato Tahun 2019.
5. Peraturan Nagari Taluk Tigo Sakato No. 05 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Desa) Tahun 2020.

KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGOSAKATO TAHUN 2019

1. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato No. 800 / 01 / KPTS/WN-TTS/I-2019 , tanggal 1 Januari 201 tentang 'Pengangkatan Kepala Kampung Skenagarian Taluk Tigo Sakato..
2. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 800/02/KPTS/WN-TTS/I-2019 Tanggal 1 Januari 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Taluk Tigo Sakato.

3. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor :800/03/KPTS/WN-TTS/I-2019 Tanggal 2 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato.
4. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 800/04/KPTS/WN-TTS/I-2019 Tanggal 2 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Staf Nagari.
5. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 800/05/KPTS/WN-TTS/-2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan Staf Bamus Nagari.
6. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 800/06/KPTS/WN-TTS/I-2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan Staf Nagari.
7. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor ; 7/ KPTS/WN-TTS/I-2019 Tanggal 6 Januari 2019 tentang penetapan Susunan Pengurus Mesjid, Mushallah dan Guru TPA/TPSA Sekenagarian Taluk Tigo Sakato.
8. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 800/8/kpts/wn-tts/I-2019 Tanggal 8 Januari 2019 tentang Penetapan Petugas Keluarga Berencana Desa (PPKBD) danSub PPKBD Nagari Taluk Tigo Sakato.
9. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 800/9/KPTS/WN-TTS/I-2019 Tanggal 9 Januari 2019 tentang Pembinaan / Pokja / Kader Pos Yandu Pelayanan terpadu (Pos Yandu) Nagari Taluk Tigo Sakato.
10. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 800/10/KPTS/WN-TTS/I-2019 Tanggal 19 Februari 2019 tentang Pembentukan Kelompok kerja Kampung Keluarga Berencana (KB).
11. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 800/11/KPTS/WN-TTS/II-2019 Tanggal 22 Februari 2019 tentang penetapan Struktur Pengurus TP-PKK Priode 2019 - 2024.
12. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 12/KPTS/WN-TTS/II-2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang pengangkatan Tenaga Teknis Nagari Tahun Anggaran 2019.
13. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 13/KPTS/WN-TTS/II-2019 Tanggal 22 Februari 2019 tentang Pengangkatan Guru TK /PAUD dan Guru MDA Tunas Harapan.
14. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor: 14/KPTS/WN-TTS/II-2019 Tanggal 23 Februari 2019 tentang Penetapan Kader Pos Yandu Pelayanan Terpadu (Posyandu)
15. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato 15/KPTS/WN-TTS/III-2019 Tanggal 21 Maret 2019 tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM)
16. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 16/KPTS/WN-TTS/III-2019 Tanggal 13 Maret 2019 tentang Rekening Giro Nagari Taluk Tigo Sakato.

17. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 17/KPTS/WN-TTS/2019 Tanggal 23 April 2019 tentang Susunan Pengurus Kelompok Tani P3A SAIYO Kampung Koto Panjang.
18. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 18/KPTS/WN-TTS/2019 Tanggal 13 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Pengelolaan Air Bersih Tirta Pincuran Tujuh Kampung Koto Panjang.
19. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 19/KPTS/WN-TTS/2019 Tanggal 10 Juni 2019 tentang Pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Nagari.
20. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 800/20/KPTS/WN-TTS/VI-2019 Tanggal 15 Juni 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kasi dan Kaur Nagari Taluk Tigo Sakato.
21. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor: 800/21/KPTS/WN-TTS/VI-2019 Tanggal 15 Juni 2019 tentang Pengangkatan Staf Nagari Taluk Tigo Sakato
22. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor: 800/22/KPTS/WN-TTS/VI-2019 Tanggal 15 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari
23. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 23/KPTS/WN-TTS/2019 Tanggal 21 Juli 2019 tentang Pengangkatan Pengurus BUMNAG Nagari Taluk Tigo Sakato.
24. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 24/KPTS/WN-TTS/IX/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Pembentukan Pengurus Harian Rumah Sehat Nagari Taluk Tigo Sakato
25. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor :258/K.K 03.01.04/KS.01/09/2019 Tanggal 18 September 2019 tentang Penetapan Pengurus Kampung Keluarga Sakinah Kampung Koto Panjang.
26. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 800/25/KPTS/WN-TTS/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Penetapan Pengurus P3A Rimbo Tengah
27. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 27/KPTS/WN-TTS/2019 tanggal 22 September 2019 tentang Pengesahan Pengurus Pos Penyuluh Nagari(Poslunag / Nagari Taluk Tigo Sakato)
28. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor 28/KPTS/WN-TTS/2019 Tanggal 25 September 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Tahun 2020.

29. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 29/KPTS/WN-TTS/2019 Tanggal 25 September 2019 tentang Penetapan Tim Verifikasi Usulan kegiatan Nagari Taluk Tigo Sakato tahun 2020.
30. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 30/KPTS/WN-TTS/2019 Tanggal 5 Oktober 2019 tentang penetapan Pengurus Kelompok Kolom Ikan Indah.
31. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 31/KPTS/WN-TTS/2019 Tanggal 19 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Nagari Taluk Tigo Sakato.
32. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 32/KPTS/WN-TTS/2019 Tanggal 22 November 2019 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Liga Desa/Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas.
33. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 33/KPTS/WN-TTS/2019 Tanggal 16 November 2019 tentang PembentukanPengurus Kelompok PengelolahSarana Air Minum (KP-SPAM) Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PANSIMAS)
34. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 800/34/Kpts/WN-TTS/XII-2019 Tanggal16 November 2019 tentang Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) RIMBO SIKABU Kampung Tanjung Kandis .
35. Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 35 / Kpts/ WN-TTS / 2019 tanggal 16 November 2019 tentang Penetapan Nama – nama Tim 7 Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

KEPUTUSAN BAMUS NAGARI taluk TIGO SAKATO TAHUN 2019

1. Keputusan BAMUS Nomor 01/Kpts-Bamus Nag/2019 tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taluk Tigo Sakato Tahun 2019.
2. Keputusan Bamus Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Menjadi Peraturan Nagari Tahun Anggaran 2019.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI

2.1. VISI DAN MISI

Pelaksanaan kegiatan kegiatan dan program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Taluk Tigo Sakato dalam tahun 2019 yang dituangkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Nagari Taluk Tigo Sakato tahun 2019, dan telah menyusun RPJM untuk Tahun 2018-2024

Adapun Visi Nagari Taluk Tigo Sakato dalam RPJM tahun 2018-2024 tersebut adalah sebagai berikut :

" TERWUJUDNYA MASYARAKAT TALUK TIGO SAKATO YANG MAJU SEJAHTERA DAN AGAMAIS"

Misi Nagari Taluk Tigo Sakato sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Nagari yang bersih, Transparan, Bebas dari Korupsi dan Bentuk penyelenggaraan lainnya
2. Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat dengan Prinsip 3SL (Senyum, Sambut dan Sapa)
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dalam segala bidang secara berkelanjutan

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN NAGARI

Strategi yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi adalah sebagai berikut :

1. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan mewujudkan sarana dan prasarana terutama untuk pembangunan Kantor Wai Nagari.
2. Meningkatkan pengembangan kegiatan keagamaan, Seni Budaya dan Pendidikan
3. Mengadakan pelatihan - pelatihan kepada kelompok masyarakat untuk mengerakan potensi ekonomi masyarakat.
4. Mengaktifkan BUMNAG (Badan Usaha Milik Nagari)
5. Akan Melakukan Program Beda Rumah di setiap Kampung

6. Menumbuhkan semangat Gontong Royong dengan kegiatan "Jum'at bersih
7. Pembangunan Sarana Olah Raga di setiap Kampung
8. Pembangunan Infrastruktur Nagari yang berhubungan langsung dengan pusat Ekonomi masyarakat, Khususnya Pertanian dan Perkebunan
9. Mengembangkan Pariwisata yang ada di Nagari Taluk Tigo Sakato

2.2.1.

a. Bidang Keagamaan

1. meningkatnya Pembangunan Mesjid Ruhammah Koto Keduduk, Mesjid Al Mukminin Tanjung Kandis, Mesjid Taqwa Koto Panjang, Mushallah Nurul Hikmah Tanjung Kandis, Mushallah Darul Amal Tanjung Kandis dan Mushallah Nurul Hikmah Koto Keduduk
2. Peningkatan kegiatan Kasidah Rabbana, Majelis Taqlim dan Kelompok Yasinan.
3. Peningkatan kegiatan MDA Tunas Harapan
4. Meningkatkan kegiatan Didikan Subuh
5. Mengaktifkan seluruh TPA / TPSA di setiap Kampung

b) Bidang Pendidikan

1. mengoptimalkan Potensi Nagari
2. meningkatkan SDM Masyarakat melalui pelatihan Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Paket B dan Paket C serta Pelatihan.
3. Peningkatan Kegiatan proses belajar mengajar TK dan PAUD
4. Membentuk Taman Pendidikan Al-Quran di setiap Kampung dalam Nagari Taluk Tigo Sakato.

c). Bidang Olah Raga dan Keagamaan

1. Peningkatan kegiatan Turnamen / Liga Desa serta melengkapi sarana dan Prasarana Olah Raga
2. Pembinaan / Pelatihan di Bidang Seni Budaya (Pidato Adat, Randai, Debus, Silat Dll)

3. Meningkatkan Generasi Muda dalam Bidang Khantibmas.
 4. Mengaktifkan kegiatan Ronda Malam.
- d) Bidang Kesehatan.
1. Pengobatan Gartis Kepada masyarakat
 2. Meningkatkan Kegiatan GERMAS, Penyuluhan Kesehatan
 3. Meningkatkan Kegiatan Penjegahan Anak Kurang Gizi dalam rangka pencegahan Stunting
 4. Meningkatkan Peran Kader Pos Yandu / KB, dll
 5. Meningkatkan kegiatan Program Lansia
 6. Pembarantasan Anjing Liar (Eliminasi)
 7. Pencegahan DBD dengan Foging (Pengaspalan) serta pengurusan Saluran - saluran Air.
- e) Bidang Ekonomi :
1. Melalui Kelompok – kelompok Tani Pertanian untuk meningkatkan Ekonomi rumah Tangga.
 2. melalui Kelompok Tani Gambir
 3. Melalui Kelompok Tani Ternak
 4. Melalui Perdagangan dan Home Industri
- f) Bidang Pemerintahan
- melaksanakan Tata Pemerintahan yang baik (Good Government) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta pelayanan yang Prima Trasparan, Responsive, Partisipatif dan Akuntibel kepada masyarakat Nagari Taluk Tigo Sakato.

2.3. PRIORITAS NAGARI

Berdasarkan pada kondisi, permasalahan dan potensi Nagari Taluk Tigo Sakato serta memperhatikan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat, maka pembangunan Nagari Taluk Tigo Sakato tahun 2019 diorientasikan pada beberapa bidang, antara lain :

2.3.1. Bidang Keagamaan

1. Pembangunan Mesjid Ruhammah
2. Pembangunan Masjid Al -Mukmini
3. Pembangunan Masjid Taqwa
4. Pembangunan Mushalla Nurul Hikmah
5. Pembangunan Mushalla AL Itiqomah
6. Pembangunan Mushalla Nur Amal
7. Pembangunan Mushalla Darul Amal
8. Pembangunan Mushalla Al Qaumi
9. Pembangunan Mushalla Darul Jadid
10. Pembangunan Mushalla Al Ikhlas

Pembangunan bidang keagamaan lebih banyak dalam peningkatan sarana rumah ibadah dan juga melakukan kegiatan wirid dan didikan subuh untuk anak didik MDA / TPSA yang ada di Nagari Taluk Tigo Sakato.

2.3.2. Bidang Pendidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah telah mengupayakan dan merealisasikan Honor Guru MDA dan TK – PAUD di Nagari Taluk Tigo Sakato, karena menyamai pendidikan merupakan menuai hasilnya di kemudian hari.

Dalam peningkatan mutu pendidikan Nagari TalukTigo Sakato telah didukung dengan sarana pendidikan seperti MDA, PAUD, TK, dan SD

Adapun kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas di bidang Pendidikan antara lain :

1. Mengoptimalkan Potensi Nagari
2. Melakukan pelatihan dengan mamfaatkan Dana Desa;
4. Meningkatkan SDM Masyarakat melalui Pendidikan Formal antara lain dengan memanfaatkan sarana Pendidikan yang ada yaitu:

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH MURID	JUMLAH GURU		JUMLAH PEGAWAI	
			PNS	HONOR	PNS	HONOR
1	SD NO. 32	101	9	1	-	2
2	SD NO. 18	106	6	6	-	1
3	SD NO. 15	44	5	2	-	1

2.3.3. Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Keamanan

1. Meningkatkan sarana Prasarana Olah Raga di setiap Kampung
2. Melaksanakan Latihan Volly Bal, Bola Kaki dan mengadakan Turnamen Bola Volly yang di selenggarakan oleh Nagari.
3. Meningkatkan Perans FKPM dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan yang muncul dalam masyarakat.
4. Mengaktifkan kegiatan ronda malam

2.3.4. Bidang Kesehatan

Pembangunan dalam bidang kesehatan atau peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia, untuk mewujudkan misi tersebut diperlukan keterlibatan seluruh pihak terkait dalam hal aparatur pemerintahan baik dari pusat sampai Nagari dan terutama sekali dukungan berupa peran serta aktif dari masyarakat. Salah satu perogram ini adalah

ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang baik akan membawa pengaruh positif bagi kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Beranjak dari hal diatas berbagai sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia di Nagari Taluk Tigo Sakato dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Sarana dan Prasarana Kesehatan di Nagari Taluk Tigo Sakato

NO.	KAMPUNG	SARANA / PRASARANA				
		PUSKESMAS / PUSTU	POSKESRI	POSYANDU	PRAKTEK DOKTER	PRAKTEK BIDAN
1	Koto Keduduk	-	✓	✓	-	-
2	Tanjung Kandis	-	✓	✓	-	-
3	Koto Panjang	-	✓	✓	-	-

Sumber : Data Nagari Taluk Tigo Sakato

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sarana kesehatan yang ada di Nagari Taluk Tigo Sakato boleh dikatakan telah mencukupi kebutuhan dalam hal jumlah dan pada saat ini Nagari Taluk Tigo Sakato juga telah dilengkapi dengan Mobil Ambulance milik Nagari namun sarana yang ada belum dilengkapi jumlah tenaga kesehatan yang cukup dan fasilitas / peralatan yang memadai.

Posyandu

Selain sarana kesehatan berupa puskesmas Nagari Taluk Tigo Sakato juga memiliki sarana posyandu sebanyak 4 unit yang tersebar di 3 Kampung. Posyandu yang ada telah memiliki kader aktif sebanyak 20 orang. Aktifitas Yandu telah dilaksanakan di Pos Yandu yang dibangun dengan Dana Desa di Masing Masing Kampung dan tidak lagi menggunakan Rumah Masyarakat atau tempat lain.

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap program kesehatan melalui posyandu ini masih cukup baik, hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah balita yang datang untuk ditimbang setiap bulannya yang mencapai 100 %.

Tabel posyandu

No	Nama Posyandu	Nama Kader	Lokasi/ Kampung	Ket
1	BONSAI I	NENENG SURYANI	TANJUNG KANDIS	
2	BONSAI II	RAHMA YULELNI	KOTO KEDUDUK	
3	BONSAI III	NOVA SUSRAYANA	KOTO PANJANG	
4	BONSAI IV	TASWA NIARTI	TANJUNG KANDIS	

Selain Yandu Nagari Taluk Tigo Sakato juga telah aktif dalam pencegahan Stunting dan telah memiliki Kader Stunting

Tabel Kader Stunting

No	Nama Kader	Jenis Kelamin	Alamat	Ket
1	WANDA OKTASARI	PEREMPUAN	KOTO KEDUDUK	
2	DEVI	PEREMPUAN	KOTO PANJANG	

Kesehatan Lingkungan

Kesehatan lingkungan merupakan perwujudan lingkungan hidup yang lebih bersih dan sehat agar dapat melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan masalah kesehatan, terutama sekali dari ancaman penyakit menular.

Tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan lingkungan di Nagari Taluk Tigo Sakato, sudah cukup menggembirakan, hal ini terlihat dari sebahagian besar rumah telah memiliki sarana air bersih dan WC serat Nagari Taluk Tigo Sakato juga telah memiliki Program Sani Tasi Bantuan dari Dana DAK sebagai penunjang kesehatan lingkungan. Namun untuk pembuangan sampah masih belum memadai mengingat masyarakat banyak membuang sampah ke belakang rumah dan sungai, sebab Nagari Taluk Tigo Sakato berada sepanjang Aliran sungai. Adapun kegiatan kesehatan lingkungan yang telah dilakukan antara lain :

1. Pengobatan gratis untuk masyarakat
2. Pemberantasan anjing liar (eliminasi)

3. Pencegahan DBD serta pengurusan Saluran - saluran Air
3. Meningkatkan peran kader posyandu/KB

2.3.5. Bidang Ekonomi

Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berbasis Nagari merupakan salah satu rencana strategis pembangunan di Nagari Taluk Tigo Sakato. Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato senantiasa tetap berusaha mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi kepada pemulihan ekonomi guna mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kokoh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kondisi tersebut akan tercapai dengan cara melalui pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi yang terutama Pertanian, perkebunan, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi /Kelompok SPP melalui sistim ekonomi kerakyatan yang tertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan serta sumber daya manusia yang produktif dan mandiri.

Dalam menunjang ekonomi masyarakat Nagari Taluk Tigo Sakato tersedia lembaga-lembaga keuangan sebagai berikut :

No	Nama Lembaga Keuangan	Lokasi/ Kampung	Ket
1	2	3	4
1	Lembaga Keuangan Masyarakat (LKMA)	1 unit /Koto keduduk	Aktif

Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di Nagari Taluk Tigo Sakato adalah sebagai berikut :

1. Melalui Kelompok-Kelompok Tani Pertanian untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga
2. Melalui Kelompok Tani Perkebunan
3. Melalui Kelompok Tani Ternak
4. Melalui Perdagangan dan Home Industri
5. Melalui Kelompok - kelompok SPP yang ada di Nagari Taluk Tigo Sakato

Adapun pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh lembaga-lembaga keuangan yang ada di Nagari seperti Ekonomi Mikro, dan juga bantuan pinjaman permodalan yang diberikan oleh LKMA melalui Kelompok-Kelompok SPP yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015 lalu pada tahun 2016 Nagari Taluk Tigo Sakato juga sudah mendirikan BUMNAG dan telah beroperasi di tahun 2018 dengan bantuan modal sebanyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) di anggarkan dari Dana Desa tahun 2017.

2.3.6. Bidang Pemerintahan

Melaksanakan tata pemerintahan yang baik (good goverment) dan pemerintahan yang bersih (clean goverment) serta pelayanan yang prima, transparan, responsive, partisipatif dan akuntabel kepada masyarakat Nagari Taluk Tigo Sakato.

BAB III

HAK ASAL USUL NAGARI

3.1.1. Program Dan Kegiatan

Untuk kelancaran tugas Pemerintahan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat, maka untuk tahun 2019 Alokasi Dana Nagari (ADD), PBH, dan SILFA Tahun 2019 boleh 5 Bidang dan Dana Desa (DD) dialokasikan dalam 3 (Tiga) Bidang sebagai berikut :

A. Bidang Pemerintahan

Dalam hal bidang Penyelenggaraan Pemerintahan untuk tahun 2019 ini, dananya berasal dari ADD, Silfa tahun 2018 dan PBH tahun 2018 sebagai berikut :

Uraian	Pagu Dana	Realisasi	Silfa
1. Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan	280.200.000,-	280.200.000,-	-
2. Kegiatan Operasional Nagari	32.121.200,-	31.952.200,-	169.000,-
3. Jaminan Sosial bagi Kepala Desa	3.600.000	3.600.000	-
4. Kegiatan Operasional Bamus Nagari	12.000.000,-	12.000.000,-	,-
5. Kegiatan Penyediaan Saran Prasarana Pemerintahan Desa	23.847.022,32	23.400.000,-	474.022,32,-
6. Kegiatan Perencanaan Pembanguna Nagari	6.466.400,-	6.466.400,-	-
7. Kegiatan Operasional Rastra	475.000,-	475.000,-	-
8. Kegiatan Penyusunan dan Pendataan Profil Desa	6.000.000,-	6.000.000,-	,-
9. Penyusunan Dokumen Desa Kader Teknis	600.000,-	600.000,-	-
10. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Nagari	12.000.000-	12.000.000,-	,-
11. Kegiatan Intensifikasi Pemungutan PBB	1.311.622,23,-	1.311.000,-	622,23

12. Pengadaan Peralatan Kantor Printer Epson L 36	3.000.000	-	3.000.000
13. Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari	35.863.800	32.400.000	12.463.800
14. Proses Perencanaan Desa	4.637.500	4.637.500	-
JUMLAH	398.722.544,55	382.642.100	16.107.444,55

B. Bidang Pembangunan

Dalam hal pembangunan untuk tahun 2019 ini, pembangunan dananya berasal dari Dana Desa (DD) tahun 2019 yaitu :

Uraian	Pagu Dana	Realisasi	Silfa
1. Kegiatan Pengembangan Wisata Batu Kudo	71.353.363,-	71.353.000,-	863
2. Penceran Halaman TK -PAUD Tunas Harapan	81.000.000,-	81.000.000,-	-
3. Parit Miring & Rabat Beton Jln.Perkebunan	46.000.000	46.000.000	-
4. Kegiatan Pengadaan Kolom Ikan Nagari	76.000.000,-	76.000.000,-	-
5. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pokesri dan Mobiler, Kilo Meter Listri Pos Yandu	32.850.000	32.850.000	-
6. Kegiatan Rabat Betron Jalan Kemesjid Taqwa	56.000.000	56.000.000	-
7. Kegiatan Pembangunan Gapura Wisata Batu Kudo	27.650.000,-	27.650.000,-	-
8. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	45.000.000	45.000.00	-
9. Kegiatan Bantuan Jambanan masyarkat	30.000.000	30.000.000	-
10. Kegiatan Pembangunan	56.000.000,	56.000.000,-	-

Saluran Drenase Jln. Desa			
11. Pengadaan Lapangan Olah Raga	20.000.000,-	20.000.000,-	-
12. Pengadaan Plank Asmaul Husnah	25.000.000,-	25.000.000,-	-
JUMLAH	566.853.363,-	566.853.000,-	363,-

C Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Dalam hal Bidang pembinaan untuk tahun 2019 ini, dananya berasal dari ADD dan PBH tahun 2019 sebagai berikut :

Uraian	Pagu Dana	Realisasi	Silfa
1. Kegiatan Pembinaan PKK Nagari	8000 000,-	8.000.000,-	-
2. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	1.000.000,-	1.000.000,-	-
3. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat (KAN)	3.500.000,-	-	3.500.000
4. Kegiatan LPMN	5.000.000,-	-	5.000.000
5. Kegiatan Hari Besar Islam (PHBI) dan Safari Ramadhan	1.800.0000	1.000.000	800.000
6. Kegiatan Pembinaan Pemuda Nagari.	1.200.000	-	1.200.000
7. Peningkatan Aparatur Nagari Study Konfiratif Wali Nagari dan BAMUS	14.000.000	14.000.000	-
Jumlah	34.500.000	24.000.000	10.500.000

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dalam hal Bidang Pemberdayaan untuk tahun 2019 ini, dananya berasal dari Dana Desa (DD) dan satu kegiatan dibidang Pemberdayaan dananya berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut :

Uraian	Pagu Dana	Realisasi	Silfa
1. Penyertaan Bumrag Bersama Antar Nagari	10.000.000	10.000.000,-	-
2. Insentif Kader Yandu	18.000.000,-	18.000.000,-	-
3. Insentif Kader PPKBD	960.000	960.000	-
4. Insentif Kader SUB PPKBD	2.340.000	2.340.000,-	-
5. INSENTIF Kader Nagari Siaga dan Stunting	4.800.000,-	4.800.000	-
6. Insentif Kader Teknis	600.000	600.000,-	-
7. Insentif Guru TPA/TPSA	50.400.000,-	50.400.000	-
8. Insentif dan pembelian Buku Guru MDA	7.825.000	7.200.000,-	625.000
9. Insentif Kader Lansia	1.800.000,-	1.800.000,-	-
10. Kegiatan Makanan Tambahan Belita (BMT)	9.600.000	9.600.000	-
11. Kegiatan Makanan Tambahan Lansia	1.800.000,-	1.800.00,-	-
12. OP dan Honor Guru TK - PAUD	9.107.600	9.107.600	-
13. Pembuatan Profil & Pendataan Potensi Nagari	6.000.000,-	6.000.000,-	-
14. Kegiatan Goro Bakti Nagari	3.500.000	3.500.000	-
15. Kegiatan Didikan Subuh (SDS)	4.000.000,-	4.000.000,-	-
16. Kegiatan Liga Desa	10.000.000	10.000.000	-
17. Kegiatan Pelatihan KPMN	2.000.000	2.000.000,-	-
18. Kegiatan Study Komfartif TP-PKK Nagari	7.250.000,-	7.250.000	-

19. Kegiatan Pelatihan Kader Stunting Nagari	2.126.400	2.126.400,-	-
20. Kegiatan Pelatihan Kader Dasa Wisma	4.113.700,-	4.113.700,-	-
21. Kegiatan Makanan Tambahan Belita Gizi Buruk Stunting	10.800.000	10.800.000,-	-
22. BMT Ibu Hamil dalam rangka Pencegahan Stunting	10.800.000	5.400.000	5.400.000
23. Kegiatan Pelatihan Kader Yandu.	3.944.600,-	3.944.600,-	-
24. Kegiatan Perlombaan Pos Kanling Tingkat Kabupaten	7.200.000,-	7.200.000	-
25. Kegiatan Kampung Keluarga Berencana (KB)	6.675.000,-	6.675.000,-	-
26. Kegiatan Pelatihan Pengadaan Barang Dan Jasa serta Kader Teknis	2.000.000,-	2.000.000,-	-
27. Kegiatan PKK Perlombaan Pantai Tansridano	2.500.000,-	2.500.000,-	-
28. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Kolom Ikan Air Deras	8.835.200,-	8.853.200,-	-
29. Kegiatan Pelatihan Pelestarian Adat dan Agama	3.604.000	3.604.000	-
30. Kegiatan Kasidah Rabbana	3.870.599,61	3.870.500	599,61
31. Kegiatan Majelis Taqlim	3.150.000	3.150.000	-
32. Kegiatan Pelatihan Pengurus BUMNAG	3.700.000	3.700.000	-

33. Kegiatan Pelatihan Tim TPHP Nagari	1.500.000	1.500.000	-
34. Kegiatan Pelatihan Tim Verifikasi Kegiatan	1.500.000	1.500.000	-
35. Kegiatan pembuatan Peta Aset & Wilayah ADM	31.146.800	-	31.146.800
36. Kegiatan Lomba Membaca	5.224.600		5.224.600
37. Kegiatan Inovasi Taman Dasa Wisama	3.150.000	3.150.000	-
38. Kegiatan Penyuluh Kesehatan	3.125.000	3.125.000	-
JUMLAH	268.948.499,61	226.551.500	42.396.999,61

Kegiatan yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara lain :

NO	JENIS PEMBANGUNAN	Alamat/ Kampung	SUMBER
1	Normalisasi Sungai Tanjung Kandis	Kp. Tanjung Kandis	APBD Kabupten
2	Lanjutan Pembukaan Jalan Usaha Tani Bukit Lintang	Kp. Koto Keduduk	APBD Kabupten
3	Pembukaan Jalan Baru Usaha Tani Limau Antu	Kp. Koto Keduduk	APBD Kabupten
4	Pembangunan Pengeringa Rawah Rawang Kambing	Kp. Tanjung Kandis	APBD Kabupten
5	Bantuan Mesin Alsintan Kelompok Tani Sawah Jambak dan Sawah Tengah	Kp. Tanjung Kandis	APBD Kabupten
6	Bantuan Mesin Alsintan Gapoktan	NTTS	APBD Kabupten
7	Bantuan SANITASI	Kp. Koto Keduduk	DAK APBD Kabupten
8			APBD Kabupten

Sementara itu kegiatan pembangunan yang biayanya bersumber dari swadaya masyarakat adalah :

1. Pembersihan Jalan Kolompok Tani Uba Lamo
2. Pembersihan jalan Kelomok Tani Ngulambai (Jalan TMMD)

3. Pembersihan Jalan Lingkar Tanjung Kandis – Koto Panjang

i. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Semua Rencana kegiatan pembangunan untuk tahun 2019 telah selesai dilaksanakan. Disamping itu Kantor Wali Nagari Taluk Tigo Sakato dan Kantor BAMUS Nagari, PKK dan LPMN yang lebih presentatif belum dapat diwujudkan, dan baru hanya dalam tahap perencanaan.

4.1.3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Nagari

Untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari Tahun 2019, Nagari telah membentuk Panitia yang terdiri dari :

1. Aparatur Nagari
2. Kepala Kampung dan TPK Nagari.
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)
4. Organisasi Masyarakat Lainnya.

4.1.4. Permasalahan Dan Penyelesaian

Dalam pelaksanaan roda Pemerintahan terkadang kurang memenuhi keinginan kita semua, bahkan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari belum dapat terpenuhi secara keseluruhan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Belum sepenuhnya potensi yang ada di Nagari dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan roda Pemerintahan Nagari.
2. Kurangnya keahlian dan kemampuan tenaga pengelola dalam menggali potensi yang ada.
3. Masih rendahnya tunjangan Aparat Nagari yang diberikan Pemda (di bawah UMR) sehingga Aparat Pemerintahan Nagari belum dapat bekerja dengan maksimal.
4. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, yang terlihat dari masih kurangnya Nilai Swadaya dan partisipasi masyarakat

Untuk penyelesaian dari masalah yang timbul diatas, Pemerintah Nagari telah berusaha untuk memperkecil permasalahan yang timbul antara lain :

1. Bersama masyarakat mencoba untuk menggali potensi yang dimiliki Nagari agar bermanfaat serta dapat memberikan dorongan untuk pergerakan roda Pemerintah Nagari.
2. Memberikan peluang dan kesempatan kepada Aparatur Nagari untuk menambah pengetahuan guna meningkatkan keahlian.
3. Memberikan penjelasan kepada Aparatur Nagari, bahwa tunjangan yang telah diterima adalah merupakan kemampuan Pemda dan berharap untuk masa yang akan datang tunjangan yang diterima akan ada perubahan.
4. Untuk menumbuhkan dan menciptakan partisipasi dari masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah Nagari berusaha melibatkan masyarakat secara bersama-sama membangun nagari, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pembangunan yang berkelanjutan.

4.2. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN / KOTA

4.2.1. Program Dan Kegiatan

Program yang direncanakan untuk tahun anggaran 2019 berdasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018-2024, sebahagian besar dapat dilaksanakan walaupun masih ada kegiatan yang belum dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan tahun sebelumnya.

4.2.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi beberapa kegiatan antara lain :

1. Bidang Pemerintahan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Nagari merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Wacana tentang manajemen pelayanan prima, dengan harapan mampu merubah sikap dan perilaku sehingga meningkatkan kesadaran tentang kewajiban perangkat desa / nagari dalam menjamin

terlaksananya pelayanan umum yang prima untuk menjangkau masyarakat secara adil dan merata di desa / nagari.

Pelayanan prima mengandung Pengertian system pengelolaan organisasi dalam melayani kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara prima, tepat waktu, mudah, murah, merata, terbuka, efisien, dan ekonomis dalam kondisi yang adil, aman, nyaman, melalui prosedur yang sederhana jelas dan pasti. Prinsip dasar pengembangan pelayanan prima antara lain :

1. Berorientasi kepuasan pelanggan.
2. Perbaikan yang kesinambungan.
3. Manajemen berdasarkan fakta.
4. Melibatkan dan memberdayakan seluruh unsur organisasi secara menyeluruh.
5. Mengembangkan potensi daya pikir manusia.
6. Budaya organisasi adalah moral tinggi.

Berdasarkan realitas yang telah dilaksanakan, maka perlu adanya perubahan sikap dan perilaku dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Nagari karena masyarakat semakin kritis menilai kinerja perangkat desa / nagari.

Mendasari ketentuan dari prinsip - prinsip dasar pelayanan, untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa / Nagari telah melaksanakan pelayanan dalam bentuk antara lain :

1. Pembagian tugas masing - masing kaur.
2. Sistem buka kantor tepat waktu.
3. Pelayanan cepat.
4. Sistem saling membantu dan kekompakan kerja antar perangkat

Pelaksanaan pada bidang pemerintahan telah dilaksanakan kegiatan guna menunjang program pemerintah serta memberikan layanan yang

maksimal pada masyarakat, adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pembuatan Pengantar KTP
- b. Pengurusan Pembuatan IMB
- c. Legalisasi surat-surat lainnya, dan
- d. Bidang Administarsi lainnya

2. Bidang Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan kegiatan pada bidang sarana dan prasarana meliputi beberapa kegiatan Sarana Transportasi (Pembangunan dan pembukaaan sarana perhubungan kesentra usaha masyarakat melalui swadaya masyarakat)

4.2.3. Permasalahan Dan Penyelesaian

Dalam pelaksanaan kegiatan, permasalahan-permasalahan yang timbul dalam rangka realisasi dari pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2019 meliputi beberapa hal antara lain :

- Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan usaha pertanian yang timbul adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat dengan program-program pemerintah dalam percepatan pembangunan di daerah-daerah yang mendapatkan bantuan sehingga pencapaian target pelaksanaan kegiatan mengalami hambatan.

Akan tetapi berkat usaha dari Pemerintahan Nagari memberikan dan menyampaikan maksud dan tujuan dari suatu program pemerintah terhadap pembangunan baik fisik maupun non fisik pada suatu daerah, permasalahan yang timbul tersebut dapat diperkecil.

- Faktor lain yang juga menjadi permasalahan adalah faktor cuaca. Faktor cuaca yang ada pada saat pelaksanaan kegiatan juga menjadi masalah dalam penyelesaian kegiatan, akan tetapi berkat usaha dan arahan kegiatan-kegiatan yang ada dapat diselesaikan dengan baik dan ini tidak terlepas dari kebersamaan dengan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

- Faktor Kesadaran masyarakat dalam bekerjasama (gotong Royong) dengan kurangnya rasa kebersamaan dalam membangun nagari hal ini terlihat pada saat dilaksanakan Gotong Royong yang hadir lebih banyak

dari para petani dan nelayan sedangkan masyarakat yang bergerak dibidang jasa sangat kecil sekali.

Akan tetapi pemerintah nagari tidak akan bosan untuk mengajak (mengundang) masyarakat yang bergerak dibidang jasa untuk melaksanakan kegiatan gotong royong dalam menunjang pembukaan jalan ke sentra ekonomi masyarakat.

-fran-

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS DAN PEMBANTU

4.1. TUGAS PEMBANTU YANG DITERIMA

4.1.1. Dasar Hukum

Dasar hukum tentang penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952); UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;

4.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan, instansi pemberi tugas adalah :

- Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

4.1.3. Satuan Kerja Perangkat Nagari

Untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan tugas dan pembantu pada pembangunan Nagari Tahun 2019, Nagari telah membentuk Panitia yang terdiri :

1. PPKN Nagari Bidang Pembangunan
2. Kepala kampung

4.1.4. Kegiatan Yang Diterima

Kegiatan Pembantuan yang diterima oleh Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato pada tahun 2019 ini diantaranya adalah Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Kepala Kampung sebagai kolektor, sedangkan di tingkat nagari juga dibentuk Koordinator nagari yang terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan Kepala Seksi Pemerintahan.

4.1.5. Sumber Dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan

Sumber dana dan jumlah Anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan tugas dan pembantuan yang diterima selama ini belum mempunyai sumber dana dan anggaran yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan tugas dan pembantuan, namun baru hanya diberikan upah pungut untuk kolektor Rp. 1.000.- untuk satu lembar STTS, sedangkan untuk uang lelah petugas ditingkat nagari belum ada.

Sesuai dengan ketetapan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2019 PBB-P2 Nagari Taluk Tigo Sakato adalah sebagai berikut :

- Target	: Rp 13.561.346, -
- Realisasi	: Rp 12.048.941,-
- Yang bermasalah	: Rp 1.512.405,-
-STTS seluruhnya	: 655 lembar
-STTS yang distorkan	: 496 lembar

Dengan demikian target murni PBB Nagari Taluk Tigo Sakato Tahun 2019 adalah Rp 12.048.941 di kurang yang bermasalah dan tidak terpungut Rp 0,-, = Rp 12.048.941,-

Setelah dilakukan pemungutan terhadap wajib pajak terealisasi sekitar Rp Rp 12.048.941,- atau 100 % dari target murni.

4.1.6. Permasalahan Dan Penyelesaian

Permasalahan tersebut diatas telah dicoba untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat agar masyarakat berkeinginan untuk membayar kewajibannya, ditambah dengan banyaknya bantuan yang telah diterima Nagari bila dibandingkan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan masyarakat kepada Negara.

Semua permasalahan PBB tersebut telah dikumpulkan dan direkap dan selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Kantor Pendapata melalui kantor camat Batang kapas, dengan harapan ini dapat dicarikan solusinya dalam tahun 2020 ini.

fran

BAB V

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

5.1. KERJA SAMA ANTAR NAGARI

5.1.1. Kebijakan Dan Kegiatan

Adapun kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan pembangunan antara lain Pengembangan Wisata Batu Kudo, Pencoran Halaman dan Pengadaan Pintu Gerbang TK-PAUD, Pembangunan Jalan Perkebunan, Pembangunan Kolom Ikan, Pengadaan Alat Kesehatan dan Mobiler Pos Yandu, Pembangunan Saluran Pembuangan Air Jalan Desa Tanjung Durian, Sambungan Rabat Beton Jalan Mesjid Taqwa, Pembangunan Gapura Wisata Batu Kudo, Bantuan RTLH dan Bantuan Jambanisasi Masyarakat dengan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Btaang Kpas dan Pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

5.1.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi dari kerja sama antar Nagari yang telah dilaksanakan adalah secara keseluruhan Wali Nagari memberikan dukungan atas pelaksanaan, untuk Pembangunan dan pendanaan Dana Desa, serta APBD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

5.1.3. Permasalahan Dan Penyelesaian

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah belum ada yang mendampingi dalam menggunakan Dana Desa, maka segala sesuatu kegiatan Pembangunan dari Anggaran Dana Desa di kerjakan oleh Pemerintah Nagari dan kader teknis yang ada di Nagari.

5.2. KERJASAMA DENGAN PIHAK KE III

5.2.1. Kebijakan Dan Kegiatan

Dalam kegiatan kerja sama dengan pihak ketiga yang dilaksanakan oleh Nagari Taluk Tigo Sakato pada tahun 2019 lebih dititik beratkan pada kegiatan antara lain :

1. Bedah rumah tidak layak huni untuk keluarga miskin.
2. Kegiatan Pada Lembaga- lembaga yang ada di Nagari Taluk Tigo Sakato

Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan tidak lepas dari dukungan dan partisipasi dari pihak ke III seperti :

1. Perantau (dalam Provinsi maupun di luar Provinsi)
2. Pengusaha
3. Donatur lainnya yang tidak mengikat

5.2.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan di atas bantuan yang diterima oleh Pemerintahan Nagari dari pihak ke III yang tersebut diatas sangatlah memberikan dorongan dan motivasi guna suksesnya kegiatan tersebut diatas.

5.2.3. Permasalahan Dan Penyelesaian

Adapun permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dirasakan karena masih kurangnya minat dari putra nagari untuk mengikuti kegiatan tersebut. Untuk menindaklanjuti keterbatasan tersebut pihak Pemerintah Nagari akan berusaha untuk memberikan informasi dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang berkompeten dimasa yang akan datang.

5.3. BATAS NAGARI

5.3.1. Kebijakan Dan Kegiatan

Di alam Minangkabau ini untuk Batas-batas Nagari ini selalu mengambil batas alam seperti Bandar, Batang Air dan Jalan, Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Batas Nagari, apalagi Nagari Taluk Tigo Sakato baru saja melakukan pemekaran dari Nagari Taluk. Batas-batas Nagari saat ini masih merupakan batas-batas desa lama, yang berbatas sebelah Timur Nagari Solok Selatan, sebelah barat dengan Nagari Taluk , sebelah Utara dengan Nagari Sungai Nyalo, sebelah Selatan dengan Nagari Koto Taratak.

5.3.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi dan Pelaksanaan kegiatan tentang batas Nagari ini Pemerintahan Nagari tidaklah terlalu mengubris dan hanya mempertahankan batas-batas Alam yang telah adadan ditentukan oleh pimpinan terahulu.

5.3.3. Permasalahan Dan Penyelesaian

Untuk mengatasi permasalahan batas nagari ini kedepannya mengingat setiap nagari mempunyai potensi kekayaan alam yang terkandung didalamnya, maka telah dibicarakan dengan kerapatan Adat Nagari Taluk Tigo Sakato dan Pemerintahan Nagari yang ada Termasuk di Kecamatan, namun belum ada tindak lanjut.

5.4. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

5.4.1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya

Dalam mangantisipasi bahaya yag ditimbulkan akibat bencana yang terjadi, Pemerintahan Nagari telah menyampaikan kepada masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana antara lain :

1. Sosialisasi menanggulangi bencana yang diakibatkan oleh alam seperti bencana gempa, dan banjir yang terjadi setiap tahunnya pada musim hujan.
2. Sosialisasi menanggulangi bencana yang diakibatkan oleh manusia seperti bencana kebakaran.

5.4.2. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Dalam menantisipasi bencana Pemerintahan Nagari telah mengangarkan Bantuan permula di Bidang Penanggulangan Bencana dari Dana Desa namun Ngaari tetapmengharapkan adanya anggaran khusus yang di alokasikan oleh Pemerintah Daerah.

5.4.3. Antisipasi Nagari

Dalam mengantisipasi bencana yang timbul, Pemerintahan Nagari telah mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat terutama sekali bekerjasama BPBD dengan mengirim anggota siaga bencana dalam mengikuti pelatihan di tingkat Kabupaten.

5.4.4. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Melihat geografis dari Nagari Taluk Tigo Sakato, Potensi bencana yang diperkirakan dapat terjadi di Nagari Taluk Tigo Sakato antara lain :

1. Bencana Longsor

Dibeberapa tempat di Nagari Taluk Tigo Sakato berpotensi untuk terjadinya longsor karena daerah tersebut berupa tebing-tebing, dan dikhawatirkan apabila terjadi longsor akan menimbulkan kerugian baik moril maupun material seperti terdapat di Kampung Tanjung Kandis dan Koto Panjang terutama sekali akan menimbun badan jalan yang merupakan urat nadi perekonomian dan lahan pertanian serta perkebunan masyarakat.

2. Bencana Kebakaran

Potensi untuk terjadinya bencana kebakaran juga menjadi perhatian bagi Pemerintahan Nagari, karena pada saat musim kemarau datang bencana tersebut menjadi ancaman bagi masyarakat, mengingat pemukiman penduduk (perumahan) yang cukup padat dan rapat, akan tetapi berkat kerjasama dan pengertian dari masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap bahaya tersebut.

3. Bencana Gempa

Bencana gempa yang terjadi pada tahun 2007 dan 2009, telah menjadikan sebuah pengalaman yang pahit bagi seluruh masyarakat Nagari Taluk Tigo Sakato karena dengan kejadian tersebut masyarakat banyak yang trauma karena berkembangnya isu bahwa akan adanya gempa susulan yang lebih besar serta mengakibatkan terjadinya tsunami.

5.5. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Satuan Kerja Perangkat Nagari di Nagari Taluk Tigo Sakato yang bertugas menjaga stabilitas kehidupan masyarakat yang aman, tentram, tertib dan dinamis adalah berkat dikoordinir oleh Kasi Pemerintahan, FKPM Babinsa, dan Babinmas serta seluruh elemen dalam masyarakat Nagari Taluk Tigo Sakato.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan Nagari, antara lain :

- a. Kasi pemerintahan melakukan koordinasi, mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi dan menyusun program bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di Nagari Taluk Tigo Sakato.

- b. Kasi pemerintahan melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan Batang Kapas, Polsek Batang Kapas dan Koramil Batang Kapas, melalui Babinmas dan Babinsa yang ada di Nagari Taluk Tigo Sakato.

5.5.1. Gangguan Yang Terjadi

Dalam tahun 2019 gangguan keamanan dan ketertiban tidak terjadi di Nagari Taluk Tigo Sakato. Hal ini adalah berkat koordinasi yang baik Pemerintah nagari dengan semua tokoh masyarakat.

5.5.2. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Nagari

Satuan pelaksana kegiatan Nagari Taluk Tigo Sakato dalam pelaksana kegiatan terdiri dari beberapa lembaga antara lain :

1. Kasi Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato.
2. FKPM (forum Kemitraan Perpolisian dan Masyarakat)
3. Ketua Organisasi Pemuda yang ada di setiap Kampung.
4. Satuan keamanan lainnya seperti Hansip dan Linmas
5. Ronda Malam yang mana kegiatan Ronda malam dilaksanakan disetiap kampung yang ada di Nagari Taluk Tigo Sakato, terutama sekali Pemuda yang selalu nongkrong di setiap balai Pemuda.

5.5.3. Data Perangkat Nagari

NO	N A M A	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4
1	NOFRIANDI	Wali Nagari	SLTA
2	ILNASDI	Sekretaris Nagari	SMEA
3	YAYAN KURNIAWAN	Kasi. Pemerintahan	SLTA
4	ERMAYENTI	Kasi KESRA dan Pelayanan	SLTA
5	ZARLIA MIZA, S.TP	Kaur Perencanaan dan Keuangan	S.I
6	NORAMARDANI, ST	Kaur TU dan Umum	S.I
7	SELVIA DONA	Kaur Keuangan Nagari	S.1
8	MITA SAFITRI, S.Pd	Staf	S.I
9	HANDARI AFANI	Staf	SLTA
10	RISMANTON,SH	Staf	S.I
11	SYAFRIANDI	Kepala Kampung Koto Keduduk	SLTA
12	YULKISMAN	Kepala Kampung Tanjung Kandis	SLTA
13	BUSRIWANDRI	Kepala Kampung Koto Panjang	SLTA

5.5.4. Sumber Dana Jumlah Anggaran

Dalam pelaksanaan kegiatan ini Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato sudah mengalokasikan dana untuk menunjang kegiatan Keamanan dan Ketertiban di Nagari Taluk Tigo Sakato .

5.5.5. Penanggulangan Dan Kendalanya

Dalam pelaksana kegiatan gangguan kewan dan ketertiban umum ini memang terkendala dengan dana dan peralatan yang di miliki oleh masing – masing organisasi untuk penanggulangan keamanan dan ketertiban umum ini secara bersama memohon kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana secara khusus untuk meningkatkan Keamanan dan ketertiban.

5.5.6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penyelenggaraan

Dalam pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban dari pihak terkait selalu melaksanakan pembinaan dan mengarahkan kegiatan yang dilaksanakan Pihak yang ikut serta dalam pembinaan antara lain :

1. Kapolsek Batang Kapas
2. Danramil Batang Kapas dan Dinas terkait lainnya.

BAB VI

P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007 dan juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, khususnya pasal 13, selain Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) ini juga masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dengan disusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan ini diharapkan segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Taluk Tigo Sakato atas dasar musyawarah dengan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari, dan LPMN serta Lembaga-Lembaga yang ada di Nagari Taluk Tigo Sakato dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dapat menjadi dasar bagi tercapainya suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Taluk Tigo Sakato Tahun 2019 ini dapat dijadikan bahan kajian untuk pelaksanaan tugas yang akan datang

Nagari Taluk Tigo Sakato, Februari 2020

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO,

